



STATISTIK POTENSI KELURAHAN KOTA JAKARTA BARAT

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF
WEST JAKARTA MUNICIPALITY*

VOLUME 2, 2025



2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA BARAT**
BPS-JAKARTA BARAT MUNICIPALITY

STATISTIK POTENSI DESA JAKARTA BARAT

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF
WEST JAKARTA REGENCY*

VOLUME 2, 2025

2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA BARAT**
BPS-JAKARTA BARAT MUNICIPALITY



Statistik Potensi Desa Indonesia 2025
Village Potential Statistics of Indonesia 2025
Volume 2, 2025

Katalog/Catalogue: 1105014.3174

ISSN. -

Nomor Publikasi/Publication Number: 31740.25017

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xxiv+180 Halaman/Pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat

BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality

Penyunting/Editor:

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat

BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality

Pembuat Kover/Cover Designer:

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat

BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality

Diterbitkan oleh/Published by:

© Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat

BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

canva.com, freepik.com, unsplash.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat.

It is prohibited reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics of Jakarta Barat.



ISSN -

Tim Penyusun *Compilers*

Statistik Potensi Desa Indonesia 2025
Village Potential Statistics of Indonesia 2025
Volume 2, 2025

Pengarah/Director
Muhammad Noval

Penanggung Jawab/Person in Charge
Stephani Febryanna

Penyunting/Editor
Heru Agung Santoso

Pengolah Data, Penulis Naskah, dan Penerjemah/Data Processors, Writers, and Translators
Najla' Salshabilla

<https://jakbar.bps.go.id>



Kata Pengantar

Statistik Potensi Kelurahan Kota Jakarta Barat 2025 merupakan seri publikasi BPS Provinsi Kota Jakarta Barat yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Khusus untuk Provinsi Kota Jakarta Barat yang seluruh wilayahnya merupakan Kelurahan, maka Publikasi Podes disebut Potensi Kelurahan. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di seluruh Kota Jakarta Barat menurut potensi yang dimiliki kelurahan, ketersediaan infrastruktur di kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi kelurahan.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu Potensi Kelurahan, Kerawanan Kelurahan, dan Infrastruktur di Kelurahan. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi pada tingkat provinsi ini merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan Podes 2025 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Jakarta Barat



Muhammad Noval



Preface

Village Potential Statistics of Jakarta Barat Municipality 2025 belongs to a series of publications by BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality which presents the results of the Urban Village Development Data Update (Urban Village Potential 2025). This publication contains an overview of urban village-level government administration areas throughout Jakarta Barat according to the potential of the urban village, the availability of infrastructure in the urban village, and also the challenges faced in the urban village.

Data and information presented at the municipality level are the aggregation of data from all sub-districts within Jakarta Barat. This publication is expected to be a reference for data and information on infrastructure and regional potential for policymakers at the national and regional levels, as well as for researchers, academics, and data users in general. Early detection and phenomenon of infrastructure availability as well as potential among regions are captured in the various tables presented in this publication.

We would like to thank all parties who have participated in making the Urban Village Development Data Update (Urban Village Potential 2025) activity a success until this publication was compiled. We welcome constructive criticism and suggestions from users of this publication to improve future editions of this publication.

Jakarta, December 2025
Chief Statistician-BPS Statistics of
Jakarta Barat Municipality



Muhammad Noval





Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Barat telah sukses merampungkan kegiatan strategis Pemutakhiran Data Perkembangan Kelurahan melalui sensus Potensi Desa (Podes) 2025 yang dilaksanakan secara serentak pada bulan Juni 2025. Pendataan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap unit administrasi pemerintahan terkecil, di mana seluruh wilayah cakupan di Kota Jakarta Barat merupakan wilayah kelurahan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Podes 2025 mencatat keberadaan 56 kelurahan yang tersebar secara proporsional di 8 kecamatan. Berkat sinergi yang kuat antara petugas lapangan dan aparatur wilayah, seluruh kelurahan tersebut berhasil didata secara tuntas (100 persen) dalam kondisi yang kondusif tanpa kendala keamanan berarti.

Instrumen Podes 2025 dirancang untuk memotret potret multidimensi wilayah secara mendalam. Data yang dihimpun mencakup spektrum yang luas, mulai dari identifikasi potensi lokal hingga analisis kerentanan serta ketersediaan infrastruktur dasar. Cakupan informasi tersebut meliputi dinamika kependudukan, kondisi perumahan dan kualitas lingkungan hidup, rekam jejak bencana alam serta upaya mitigasinya, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, aksesibilitas transportasi, infrastruktur komunikasi dan informasi, kekuatan ekonomi wilayah, stabilitas keamanan, hingga profil tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

Karakteristik unik Jakarta Barat sebagai pusat metropolitan tercermin dengan jelas dalam hasil survei ini. Berbeda dengan profil nasional yang masih didominasi sektor primer, mayoritas penduduk di seluruh kelurahan di Jakarta Barat menggantungkan mata pencaharian pada sektor jasa dan industri. Kekuatan ekonomi mikro di wilayah ini juga sangat menonjol, di mana hampir sebagian besar kelurahan telah memiliki produk barang atau jasa unggulan yang kompetitif. Keberhasilan ekonomi ini didukung secara linier oleh aksesibilitas fasilitas perkreditan serta penetrasi teknologi informasi yang masif; seluruh kelurahan di Jakarta Barat kini telah terlayani oleh sinyal telepon seluler dengan kekuatan yang optimal serta jaringan internet broadband yang mumpuni untuk mendukung ekosistem digital.

Namun, pesatnya urbanisasi juga membawa tantangan lingkungan yang signifikan. Podes 2025 mencatat adanya titik-titik pencemaran air, tanah, dan udara di beberapa wilayah tertentu. Selain itu, dalam periode pengamatan Januari 2024 hingga Mei 2025, bencana banjir tetap teridentifikasi sebagai tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus dalam skema mitigasi bencana wilayah. Data ini memberikan peringatan dini sekaligus basis evaluasi bagi pembangunan infrastruktur drainase dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.



Dalam aspek kesejahteraan sosial, Jakarta Barat menunjukkan keunggulan pada ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang komprehensif. Di sektor pendidikan, warga memiliki akses luas terhadap sarana belajar dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Begitu pula di sektor kesehatan, wilayah ini diperkuat oleh jejaring Rumah Sakit pusat, Puskesmas rawat inap, hingga Puskesmas non-rawat inap yang tersebar merata guna menjamin layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai penutup, seluruh rangkaian data Podes 2025 ini merupakan aset intelektual yang sangat bernilai bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Melalui prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga (quality of life), data ini akan berfungsi sebagai instrumen analisis kewilayahan yang krusial. Hasil Podes 2025 diharapkan dapat menjadi kompas utama bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun program pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat kelurahan demi mewujudkan Jakarta Barat yang lebih tangguh dan maju.

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Executive Summary

BPS-Statistics of Jakarta Barat has successfully completed the strategic 2025 Village Development Data Update through the 2025 Village Potential (Podes) census, conducted simultaneously in June 2025. This data collection was carried out comprehensively across the smallest government administrative units, where all covered areas in Jakarta Barat consist of urban villages (Kelurahan). Based on the recapitulation results, Podes 2025 recorded 56 urban villages proportionally distributed across 8 sub-districts. Thanks to the strong synergy between field officers and regional authorities, 100 percent of these villages were fully surveyed in a conducive environment without any significant security obstacles.

The Podes 2025 instrument was designed to capture a deep, multidimensional portrait of the region. The collected data covers a broad spectrum, ranging from the identification of local potential to vulnerability analysis and the availability of basic infrastructure. This information includes population dynamics, housing and environmental quality, records of natural disasters and their mitigation efforts, availability of education and health facilities, transportation accessibility, communication and information infrastructure, regional economic strength, security stability, and the governance profiles at the village level.

The unique characteristics of Jakarta Barat as a metropolitan hub are clearly reflected in these results. In contrast to the national profile, which is still dominated by the primary sector, the majority of residents across all villages in Jakarta Barat rely on the service and industrial sectors for their livelihoods. The micro-economic strength of the region is also prominent, with nearly most villages possessing competitive flagship products or services. This economic success is linearly supported by accessibility to credit facilities and massive information technology penetration; all villages in Jakarta Barat are now served by optimal cellular signals and reliable broadband internet networks to support the digital ecosystem.

However, rapid urbanization also brings significant environmental challenges. Podes 2025 noted points of water, soil, and air pollution in certain areas. Furthermore, during the observation period from January 2024 to May 2025, flooding remained identified as the primary challenge requiring special attention within the regional disaster mitigation scheme. This data provides an early warning as well as an evaluative basis for more sustainable drainage infrastructure development and urban environmental management.

In the aspect of social welfare, Jakarta Barat demonstrates excellence in the availability of



comprehensive public service infrastructure. In the education sector, residents have broad access to learning facilities from elementary levels to universities, managed by both the state and the private sector. Similarly, in the health sector, the region is strengthened by a network of central hospitals, inpatient community health centers (Puskesmas), and non-inpatient health centers distributed evenly to ensure inclusive healthcare for all levels of society.

In conclusion, the entire series of Podes 2025 data represents a highly valuable intellectual asset for the Jakarta Barat Administrative City Government. Through development priorities oriented toward economic equality and improving the residents' quality of life, this data will serve as a crucial regional analysis instrument. The results of Podes 2025 are expected to become the primary compass for policymakers in formulating development programs that are more precise, efficient, and based on the real needs at the village level to realize a more resilient and advanced Jakarta Barat.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Daftar Isi

Contents

Statistik Potensi Desa Kota Jakarta Barat 2025

Village Potential Statistics of Jakarta Barat Municipality 2025

Volume 2, 2025

	Halaman Pages
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	v
Ringkasan Eksekutif/ <i>Executive Summary</i>	vii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	xi
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i>	xiii
Daftar Lampiran/ <i>List of Appendices</i>	xix
Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)/ <i>Technical Notes of Village Development Data Update 2025 (Potential Village 2025)</i>	xxi
1. Keterangan Umum Desa/ <i>General Information of the Village</i>	1
2. Perumahan dan Lingkungan/ <i>Settlement and Environment</i>	13
3. Pendidikan dan Kesehatan/ <i>Education and Health</i>	31
4. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi/ <i>Transportation, Communication, and Information</i>	43
5. Sarana Ekonomi dan Industri/ <i>Economic and Industry Facilities</i>	57
6. Keuangan dan Aset Desa/ <i>Village Financial and Assets</i>	69
7. Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan/ <i>Village/ Subdistrict Government Information</i> ..	77
8. Bencana Alam dan Gangguan Keamanan/ <i>Natural Disaster and Security Disturbance</i>	89
9. Infrastruktur Pendidikan/ <i>Education Infrastructure</i>	109
10. Infrastruktur Kesehatan/ <i>Health Infrastructure</i>	119
11. Infrastruktur Ekonomi/ <i>Economy Infrastructure</i>	129
Daftar Pustaka/ <i>Bibliography</i>	139
Lampiran/ <i>Appendix</i>	141

Daftar Tabel

List of Tables

Tabel
Tables

Halaman
Pages

1. KETERANGAN UMUM DESA GENERAL INFORMATION OF THE VILLAGE	1
1.1 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Pemerintahan, 2025 <i>Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by District and Governmental Classification, 2025</i>	8
1.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Village Location to Forest Area, 2025</i>	9
1.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Lokasi Desa Terhadap Laut, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Location of Village Toward the Sea, 2025</i>	10
1.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Main Income Source of the Majority of Population, 2025</i>	11
1.5 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Sub Sektor Utama, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector by District and Main Type of Sub-Sector, 2025</i>	12
2. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SETTLEMENT AND ENVIRONMENT	13
2.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by District, 2025</i>	20
2.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Source of Lighting for the Main Village Road, 2025</i>	21
2.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families, 2025</i>	22
2.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Agent/Seller of Fuel, 2025</i>	24
2.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Environmental Pollution, 2025</i>	25
2.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kecamatan dan Sumber Utama Pencemaran, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Environmental Pollution by District and Main Source of Pollution, 2025</i>	26

2.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, 2025 <i>Number Villages/Subdistricts by District and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities, 2025</i>	27
2.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 2025 <i>Number Villages/Subdistricts by District and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities, 2025</i>	28
3.	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN EDUCATION AND HEALTH	31
3.1	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan dan Jenis Sarana Pendidikan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Availability Educational Facilities by District and Type of Educational Facilities, 2025</i>	39
3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenis Sarana Kesehatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with by Availability of Health Facilities by District and Type of Health Facilities, 2025</i>	40
3.3	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by District, 2025</i>	42
4.	ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI TRANSPORTATION, COMMUNICATION, AND INFORMATION	43
4.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Prasarana Transportasi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Transportation Infrastructure, 2025</i> ...	48
4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Ketersediaan Angkutan Umum, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Public Transportation, 2025</i>	49
4.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Ketersediaan Angkutan Online, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Online Transportation, 2025</i>	50
4.4	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by District and Type of the Widest Road Surface, 2025</i>	51
4.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Existence of Base Transceiver Station (BTS), 2025</i>	52
4.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Strenght of Cellular Phone Signal, 2025</i> ...	53
4.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kekuatan Sinyal Internet, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Strenght of Internet Signal, 2025</i>	54
4.8	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by District, 2025</i>	55
5.	SARANA EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRY FACILITIES	57

Tabel Tables	Halaman Pages
5.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by District, 2025</i>	62
5.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Shopping Complexes and Markets, 2025</i>	63
5.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Bank, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Bank, 2025</i>	64
5.4 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Cooperatives by District, 2025</i>	65
5.5 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by District, 2025</i>	66
5.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by District, 2025</i>	67
5.7 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Produk Barang Unggulan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Leading Products, 2025</i>	68
6. KEUANGAN DAN ASET DESA VILLAGE FINANCIAL AND ASSETS	69
6.1 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Sistem Informasi Desa, 2025 <i>Number of Villages by District and Availability of Village Information System, 2025</i>	72
6.2 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa, 2025 <i>Number of Villages by District and Village Financial System, 2025</i>	73
6.3 Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by District, 2025</i>	74
6.4 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024 <i>Number of Villages by District and Availability of Village Regulation for 2024</i>	76
7. KETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN VILLAGE/SUBDISTRICT GOVERNMENT INFORMATION	77
7.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by District, 2025</i>	81
7.2 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by District and Sex, 2025</i>	82
7.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by District and Age Group, 2025</i>	83
7.4 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur, 2025	

	<i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by District and Age Group, 2025</i>	84
7.5	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by District and Education Attainment, 2025</i>	85
7.6	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by District and Education Attainment, 2025</i>	87
8.	BENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN NATURAL DISASTER AND SECURITY DISTURBANCE	89
8.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster, 2025</i>	97
8.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana Alam, 2025' <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Natural Disaster, 2025'</i>	98
8.3	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kecamatan, 2025' <i>Number of Villages/Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by District, 2025'</i>	100
8.4	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kecamatan, 2025' <i>Number of Villages/Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by District, 2025'</i>	102
8.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and the Occurrence of Mass Fight, 2025</i>	104
8.6	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kecamatan dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by District and the Presence of Fatalities and Injuries, 2025</i>	105
8.7	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kecamatan dan Inisiator Penyelesaiannya, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by District and Initiator of the Resolution, 2025</i>	106
8.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Citizen's Effort to Secure Community, 2025</i>	107
9.	INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN EDUCATION INFRASTRUCTURE	109
9.1	Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public and Private Elementary Schools by District, 2025</i>	113
9.2	Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public and Private Junior High Schools by District, 2025</i>	114

Tabel Tables		Halaman Pages
9.3	Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public and Private Senior High Schools by District, 2025</i>	115
9.4	Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public and Private Vocational Schools by District, 2025</i>	116
9.5	Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public and Private Academy/University by District, 2025</i>	117
10.	INFRASTRUKTUR KESEHATAN HEALTH INFRASTRUCTURE	119
10.1	Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by District, 2025</i>	125
10.2	Banyaknya Puskesmas Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Public Health Center by District, 2025</i>	126
10.3	Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by District, 2025</i>	127
11.	INFRASTRUKTUR EKONOMI ECONOMY INFRASTRUCTURE	129
11.1	Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Shopping Complexs And Markets by District, 2025</i>	134
11.2	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Trading Facilities by District, 2025</i>	135
11.3	Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Acomodation Facilities by District, 2025</i>	136
11.4	Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Bank Facilities by District, 2025</i>	137
11.5	Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kecamatan, 2025 <i>Number of Cooperative by District, 2025</i>	138



Daftar Lampiran

List of Appendices

Lampiran
Appendices

Halaman
Pages

1. Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut Kecamatan
Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) by District 143
2. Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)
Questionnaire of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)..... 144


<https://jakbarkota.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)

1. Pendataan Podes telah dilaksanakan sekitar 19 kali sejak 1976. Dalam 16 tahun terakhir (2008 - 2024) dilaksanakan dua tahun menjelang sensus. Mulai tahun 2019, pada tahun-tahun yang tidak ada Pendataan Podes, dilakukan Updating Podes (Pemutakhiran Data Perkembangan Desa)
2. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk *Updating Master File Desa* (MFD); (2) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi, sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah; (3) menyediakan data bagi keperluan klasifikasi tipologi desa; (4) menyediakan data bagi keperluan penyusunan Indeks Kesulitan Geografis sebagai salah satu alokasi dana desa, (5) sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik; (6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*); (7) menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana,

Technical Notes on Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)

1. *Village Potential Census (Podes) has been carried out approximately 19 times since 1976. In the last 16 years, (2008-2024), Village Potential Census has been carried out every two years prior to census. Starting in 2019, in years when there is no Village Potential Census, Podes updating (Village Development Data Update) is carried out.*
2. *The Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) is carried out to achieve the following objectives: (1) to serve as data source to update the BPS "Master File Desa" (Village Master File); (2) to provide the data on the existence and development of the potential of villages/subdistricts include social, economy, and facilities and infrastructures aspect; (3) to provide the data for village classification typology; (4) to provide data for the preparation of the Geographical Difficulty Index, which is used as one of the bases for village fund allocation; (5) to serve as a data source for updating statistical area map; (6) to provide main data for compilation of small area statistics; (7) to provide data for compilation of various analyses such as identification and determining disadvantaged village, context variables in the PMT, identification of disaster prone village, and identification of the*




dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis; (8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

3. Podes 2025 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen Podes 2025 yang digunakan sebanyak dua jenis kuesioner, yaitu: PODES2025-DESA dan PODES2025-2T. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Juni 2025, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.
6. Pengumpulan data Podes 2025 dilakukan melalui wawancara

village with geographical difficulties; (8) to provide the data used for calculating the village development/progress index.

3. *Podes 2025 is implemented in all administrative region equivalent to village, including villages, sub-districts, nagari, Transmigration Settlement Units (UPT), and Entity of Transmigration Settlement (SPT) that are still under the guidance of the relevant ministries throughout Indonesia.*
4. *An administrative area is designated as a target location for data collection if it has been declared as a definitive and operational area, based on the following criteria: (1) having jurisdiction with clear boundaries, (2) has a population residing permanently in its territory, and (3) has a legitimate and sovereign government.*
5. *The instruments of Podes 2025 consist of two types of questionnaires, namely: PODES2025-DESA and PODES2025-2T. Meanwhile, the time reference for each data refers to the enumeration period, which is June 2025, except for certain data that are specified to have different reference periods, such as one or three years prior to the enumeration period.*
6. *Data collection of Podes 2025 carried out through direct interviews by trained*



langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS kabupaten/kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2025. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui *web dashboard*.

7. Pengolahan data Podes 2025 secara umum sudah dilakukan secara otomatis melalui penggunaan CAPI dalam pencacahan, sehingga input data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses wawancara. Selain berfungsi sebagai media input data, CAPI juga merupakan media pertama yang digunakan untuk melakukan evaluasi data dengan rule validasi yang telah terpasang dalam aplikasi. Dalam rangka menjamin kualitas data, pelaksanaan Podes 2025 menggunakan dashboard Podes yang dilengkapi dengan menu *query tools* dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2025. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.

enumerators with relevant respondents in the enumeration area and review of relevant documents. The enumerators are BPS regency/city employees or partners that have passed Podes enumeration training. Meanwhile, the selected respondents are several people who have the knowledge, authority, and responsibility towards the target area of enumeration. The progress of data collection is reported and monitored directly through and are presented in real time on the dashboard web.

7. *The processing of Podes 2025 data has generally been carried out automatically through the use of CAPI in the enumeration so that data input can be carried out simultaneously with the interview process. In addition to functioning as a data input media, CAPI is also the first media used for evaluating data through validation rules installed in the application. To ensure data quality, the implementation of Podes 2025 utilizes the Podes Dashboard, which is equipped with query tools and tabulation features to evaluate the Podes 2025 results. In addition, data quality assurance is also carried out through data checks at various levels at the regency, provincial, up to the BPS RI level.*

- 
8. Diseminasi hasil pendataan Podes 2025 disusun ke dalam beberapa jenis publikasi yang utama yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia 2025, Statistik Potensi Desa Provinsi 2025, dan Statistik Indonesia 2026. Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 dibuat dalam dua cakupan data yaitu publikasi nasional (dirinci menurut provinsi) dan publikasi provinsi (dirinci menurut kabupaten/kota).
 9. Pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Podes 2025), terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan faktor lainnya. Cakupan desa/kelurahan yang berhasil dicacah menurut provinsi disajikan pada Lampiran 1.
8. *The dissemination of Podes 2025 is prepared into some main publications namely: Village Potential Statistics of Indonesia 2025, Village Potential Statistics of Province 2025, and Statistical Yearbook of Indonesia 2026. The book of Village Potential Statistics of Indonesia 2025 is drafted in two data scopes, namely the national publication (disaggregated by province) and the provincial publication (disaggregated by district/municipality).*
 9. *During the implementation of the Village Development Data Update 2025 (Podes 2025) 152 villages/subdistricts were not successfully enumerated due to security constraints and other factors. The coverage of successfully enumerated villages/subdistricts by province is presented in Appendix 1.*

Keterangan Umum Desa, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

General Information on Villages, Population and Employment



100 %
Bukan Desa Tepi Laut
Non-Coastal Area

0 %
Desa Tepi Laut
Coastal Area



100%
Desa di
luar hutan
Outside
the forest

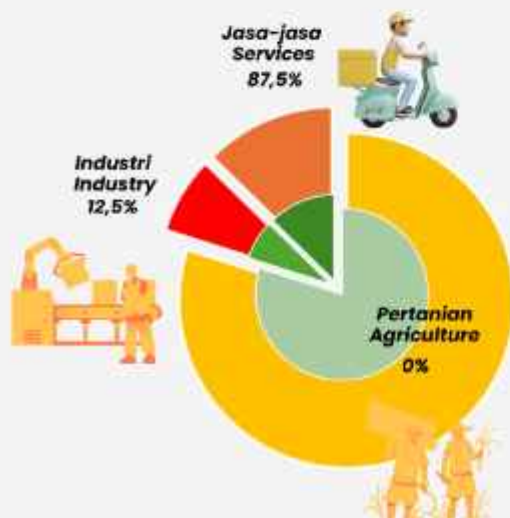
0%
Desa di tepi/sekitar hutan
Around the forest

0%
Desa di dalam hutan
Inside the forest



Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama sebagian besar Penduduk

Villages by the Main Income Source of Majority Population



Desa/Kelurahan dengan Penghasilan Utama di Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor

Villages with the Agricultural Main Income by Sub-Sector





Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal

Technical Notes General Information of the Village

1. *Village is village and custom village or that is called by other terms, hereinafter referred to as the village is the unity of the legal community who have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interest of local communities based on community initiatives, the origin and local customs that are acknowledged and respected within the unitary System of Government Republic of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 about Village).*
2. *Subdistrict is division of administrative areas in Indonesia under the district. Subdistrict is led by a head of subdistrict (Lurah) as an apparatus of district and responsible to the district head. The Lurah inaugurated by regent/mayor head as suggestion by region secretary from civil servants who qualified according regulation (Law No. 23 Year 2014 about Local Governmental).*
3. *Transmigration Settlement Unit (UPT) is entity of transmigration settlement that serves as a residence and place of business for migrants that is planned to form a village or join the local village. Organizational of transmigration*



direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi).
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.

settlement unit is a temporary institution established for at least 2 months before the migrants are placed and maximum of 5 years (Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. *Entity of Transmigration Settlement (SPT) is potential settlement unit that designed as transmigration settlements to support the economic growth centers in the region that already exist or are being developed accordance with the spatial plans (Decision of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 246 Year 2003 concerning Procedures and Criteria for Preparation of Settlement Location Transmigrasi).*
5. *Nagari is customary law community units that have certain territorial boundaries, and are authorized to regulate and manage the interests of its own local community based on the Minangkabau traditional philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) or based on local origins and customs in the West Sumatra Province (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Note: the data of nagari is found in the national publications and the publication of Province of Sumatra Barat.*



6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
 7. Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan/ Hutan, dibedakan menjadi:
 - a. Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/ dikelilingi hutan.
 - b. Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
 - c. Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.
 8. Desa Tepi Laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
 9. Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah lapangan usaha sebagian besar penduduk desa/ kelurahan memperoleh penghasilan/ pendapatan. Sumber penghasilan penduduk dibedakan kedalam tiga kategori kegiatan ekonomi antara lain:
6. *Forest is the unit of ecosystem in the form of lands comprising biological resources that are dominated by trees in their natural environment that can not be separated (Law No. 41 Year 1999).*
 7. *Village Location of the Forest Area, divided into:*
 - a. *Inside the Forest Area is the village/subdistrict whose all territory is located in the middle or surrounded by forests.*
 - b. *Around the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is adjacent to forest areas or parts of villages located in forest.*
 - c. *Outside the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is not directly adjacent to the forest.*
 8. *Coastal Village is a village which some areas are intersect/directly adjacent to the sea, either gently sloping/flat beach or cliffs/reef.*
 9. *Main Income Source of the Majority of Population is field of business where most residents earn revenue/income, main income population are divided into three categories of economic activities, including:*



- a. Pertanian, mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
 - b. Industri meliputi pertambangan dan penggalian, manufaktur, konstruksi dan utilitas publik (listrik, gas dan air), sesuai dengan kategori B sampai F ISIC 4, yang meliputi sektor Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan Konstruksi.
 - c. Jasa meliputi perdagangan grosir dan eceran, restoran dan hotel, transportasi, penyimpanan dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estat dan layanan bisnis, dan layanan masyarakat, sosial dan pribadi.
10. Jenis Komoditi/Sub Sektor Pertanian antara lain meliputi:
- a. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
 - b. Tanaman hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
 - c. Perkebunan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
- a. *Agriculture, includes all economic activities/business fields, which include the agricultural, forestry and fisheries sectors.*
 - b. *Industry includes mining and quarrying, manufacturing, construction, and public utilities (electricity, gas, and water), according to categories B to F ISIC 4, which includes the Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity and Gas Supply, Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling, and Construction sectors.*
 - c. *Services include wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation, storage and communications, finance, insurance, real estate and business services, and community, social and personal services.*
10. *The Type of Commodity/Agriculture Subsector,*
- a. *Food crops are grouped based on age, namely annual crops and perennial crops.*
 - b. *Horticultural crops more often refer to edible products or garden crops, such as fruits, vegetables, and ornamental plants.*
 - c. *Plantations are grouped based on age, namely annual plants and perennial plants.*



- d. Kehutanan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar.
- e. Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
- f. Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan.
- g. Jasa penunjang pertanian dan pasca panen mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
- d. *Forestry includes the felling of trees for their wood as well as the collection and harvesting of forest products other than wild wood.*
- e. *Fisheries include the capture and cultivation of fish, crustaceans (such as shrimp and crabs), mollusks, and other aquatic life in marine, brackish, and freshwater environments. Recreational fishing is excluded.*
- f. *Animal husbandry includes the cultivation and breeding of livestock, poultry, insects, reptiles, worms, pets.*
- g. *Agricultural and post-harvest support services include supporting activities in producing agricultural products and similar activities for agriculture that are not carried out for production purposes on a fee or contract basis, including harvesting and post-harvest services, and preparing agricultural products for sale to the market.*

Tabel
Table

1.1

Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Pemerintahan, 2025

Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by District and Governmental Classification, 2025

Kecamatan District	Desa Village	Kelurahan Subdistrict	UPT/SPT Transmigration Settlement Unit/Entity of Transmigration Settlement	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	0	6	0	6
Kebon Jeruk	0	7	0	7
Palmerah	0	6	0	6
Grogol Petamburan	0	7	0	7
Tambora	0	11	0	11
Taman Sari	0	8	0	8
Cengkareng	0	6	0	6
Kali Deres	0	5	0	5
Kab/Kota	0	56	0	56
Kab/Kota	0	56	0	56



Tabel 1.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, 2025
Table 1.2 *Number of Villages/Subdistricts by District and Village Location to Forest Area, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Dalam Hutan <i>Inside Forest Area</i>	Tepi/Sekitar Hutan <i>Edge/Around Forest Area</i>	Luar Hutan <i>Outside Forest Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	0	0	6	6
Kebon Jeruk	0	0	7	7
Palmerah	0	0	6	6
Grogol Petamburan	0	0	7	7
Tambora	0	0	11	11
Taman Sari	0	0	8	8
Cengkareng	0	0	6	6
Kali Deres	0	0	5	5
Kab/Kota	0	0	56	56



Tabel 1.3 **Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Lokasi Desa Terhadap Laut, 2025**
Table 1.3 *Number of Villages/Subdistricts by District and Location of Village Toward the Sea, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Tepi Laut <i>Coastal Area</i>	Bukan Tepi Laut <i>Non-Coastal Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	6	6
Kebon Jeruk	0	7	7
Palmerah	0	6	6
Grogol Petamburan	0	7	7
Tambora	0	11	11
Taman Sari	0	8	8
Cengkareng	0	6	6
Kali Deres	0	5	5
Kab/Kota	0	56	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 1.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and Main Income Source of the Majority of Population, 2025

Kecamatan District	Pertanian Agriculture	Industri Manufacturing	Jasa Service	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	0	0	6	6
Kebon Jeruk	0	0	7	7
Palmerah	0	0	6	6
Grogol Petamburan	0	0	7	7
Tambora	0	3	8	11
Taman Sari	0	0	8	8
Cengkareng	0	0	6	6
Kali Deres	0	4	1	5
Kab/Kota	0	7	49	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table

1.5

Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Sub Sektor Utama, 2025
Number of Villages/Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector by District and Main Type of Sub-Sector, 2025

Kecamatan District	Tanaman Pangan Food Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops	Tanaman Hortikultura Horticultural Crops	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Service	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kembangan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Palmerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0	0	0	0
Tambora	0	0	0	0	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah desa/kelurahan yang **terdapat penerangan** di jalan utama desa sebanyak **56** desa/kelurahan.

The number of villages/subdistricts that have lighting on the main village roads is 56 villages/subdistricts.

Jumlah desa/kelurahan yang **tidak terdapat penerangan** di jalan utama desa sebanyak **0** desa/kelurahan.

The number of villages/subdistricts that have not lighting on the main village roads is 0 villages/subdistricts.

3 Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Paling Banyak Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Desa/Kelurahan

3 Types of Cooking Fuel Most Commonly Used by Most Families in Villages/Subdistricts



Pencemaran Lingkungan Hidup

Environmental Pollution

Pencemaran Air
Water Pollution



13 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Pencemaran Tanah
Land Pollution



4 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Pencemaran Udara
Air Pollution



9 desa/kelurahan
villages/subdistricts



Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan

1. Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. Keluarga Bukan Pengguna Listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. Jalan Utama Desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuju kantor camat terdekat.
5. Sumber Penerangan Jalan Utama Desa adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.

Technical Notes Settlement and Environment

1. *Family of PLN (State Electricity Company) Electric Consumer is user family/customer of electricity supplied by State Electricity Company with or without official meter.*
2. *Family of Electric Consumer of NonState Electricity Company (Non-PLN) is user family/customer of electricity supplied besides by National Electricity Company, eg diesel/ generator, power cultivated by the local government, private, and electricity based on community.*
3. *Non-Electricity Consuming Family is family that do not use electricity as a source of energy for home lighting.*
4. *The Main Village Road is a road that is considered by most of the local village/subdistrict residents as the most important or most frequently used road for transportation from/to the nearest subdistrict office.*
5. *The Source of Lighting for the Main Village Road is the type of lighting and funding sources for lighting on the village's main roads. They are grouped into: government-provided electricity, non-government-provided electricity, and non-electricity.*



6. Bahan Bakar adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
 7. Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 9. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).
 10. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk
6. *Fuel is the type of material that is used for cooking by the majority of families in village/ subdistrict.*
 7. *Environmental Pollution is the introduction or introduction of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities, thereby exceeding established environmental quality standards.*
 8. *Environmental Preservation is an effort to maintain the continuity of the environment's carrying capacity and carrying capacity through a series of systematic and integrated activities, such as planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement (Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management).*
 9. *Climate Change Mitigation is a control effort to reduce the risks caused by climate change through activities that reduce emissions or increase the absorption of greenhouse gases (GHG) and the storage/strengthening of carbon stocks from various emission sources (Presidential Regulation Number 98 of 2021).*
 10. *Climate Change Adaptation is an effort undertaken to increase the ability to adapt to climate change, including climate variability and extreme events,*



keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).

11. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025).
12. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020).
13. Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
14. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia

so that potential damage from climate change is reduced, opportunities posed by climate change can be exploited, and consequences arising from climate change can be addressed (Presidential Regulation Number 98 of 2021).

11. *Mangroves are coastal vegetation with a distinctive morphology and root system that adapts to tidal areas with mud or sandy mud substrates (Government Regulation (PP) Number 27 of 2025).*
12. *Reforestation is the planting of tree species in forest areas to restore forest function (Government Regulation (PP) Number 26 of 2020).*
13. *Waste Processing/Recycling is a systematic, comprehensive, and continuous activity that includes waste reduction and handling (Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management).*
14. *Organic Fertilizer is a fertilizer derived partly or wholly from plants and/or animals that have undergone an engineering process. It can be in solid or liquid form and is used to supply organic matter to improve the physical, chemical, and biological properties*



dan biologi tanah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006).

15. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009).
16. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (Undang-undang No.30/2007 Tentang Energi).
17. Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu (Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, 2017).
18. Penampungan Air Hujan (PAH) adalah bangunan tempat menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum pada sepanjang musim, baik secara individual atau komunal (Bappenas - Departemen PU, 2008).

of the soil (Minister of Agriculture Regulation Number 2 of 2006).

15. *Biopore Infiltration Holes are holes dug perpendicular (vertical) into the ground, with a diameter of 10 - 25 cm and a depth of approximately 100 cm, or not exceeding the groundwater level (Minister of Environment Regulation Number 12 of 2009).*
16. *New Energy is energy derived from new energy sources. Renewable energy sources are energy sources generated from sustainable energy resources if properly managed, including geothermal, wind, bioenergy, sunlight, water and waterfalls, as well as the movement and temperature differences of the ocean floor. (Law No. 30/2007 concerning Energy)*
17. *Crop Patterns are planting practices on a plot of land by arranging the layout and sequence of crops over a specific period, including a period of tillage and a period of no planting (Agricultural Technology Assessment Agency, 2017).*
18. *Rainwater Reservoir (PAH) is a structure used to collect rainwater to meet drinking water needs throughout the season, either individually or communally (Bappenas - Department of Public Works, 2008).*



19. Terasering atau Sengkedan adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian).

19. *Terracing or Swales is a conservation methods that involve creating terraces to reduce slope length, retain water, thereby reducing the speed and amount of surface runoff, and increasing the opportunity for water absorption by the soil (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian).*

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table

2.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kecamatan, 2025

Number of Villages/Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by District, 2025

Kecamatan District	Keluarga Pengguna Listrik Electric Consumer Families		Keluarga Bukan Pengguna Listrik ¹ Non Electric Consumer Families ¹
	PLN State Electricity Company	Non PLN Non-State Electricity Company	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	6	0	0
Kabon Jeruk	7	0	0
Palmerah	6	0	0
Grogol Petamburan	7	0	0
Tambora	11	0	0
Taman Sari	8	0	0
Cengkareng	6	0	0
Kali Deres	5	0	0
Kab/Kota	56	0	0

Catatan: ¹ Mencakup desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada keluarga pengguna listrik atau yang terdapat keluarga pengguna listrik, masih ada keluarga bukan pengguna listrik.

Note: ¹ Includes villages/subdistricts where all families are non electric consumers, as well as villages/subdistricts where some families are non electric consumers.



Tabel 2.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and Source of Lighting for the Main Village Road, 2025

Kecamatan District	Listrik Pemerintah Government- Provided Electricity	Listrik Non Pemerintah Non Government- Provided Electricity	Non Listrik Non Electricity	Tidak Ada Penerangan No Lighting	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56

Tabel
Table

2.3

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2025

Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families, 2025

Kecamatan District	Listrik Electricity	Elpiji 5,5 kg 5.5 kg-LPG	Elpiji 12 kg 12 kg-LPG	Elpiji 3 kg 3 kg-LPG	Gas Kota City Gas	Biogas Biogas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	0	0	0	6	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	7	0	0
Palmerah	0	0	0	6	0	0
Grogol Petamburan	0	0	2	5	0	0
Tambora	0	0	0	11	0	0
Taman Sari	0	0	0	8	0	0
Cengkareng	0	0	0	6	0	0
Kali Deres	0	0	0	5	0	0
Kab/Kota	0	0	2	54	0	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Lanjutan Tabel 2.3
Continued Table

Kecamatan District	Minyak Tanah Kerosane	Briket Briquettes	Arang Charcoal	Kayu Bakar Firewood	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kembangan	0	0	0	0	0	6
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0	7
Palmerah	0	0	0	0	0	6
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0	7
Tambora	0	0	0	0	0	11
Taman Sari	0	0	0	0	0	8
Cengkareng	0	0	0	0	0	6
Kali Deres	0	0	0	0	0	5
Kab/Kota	0	0	0	0	0	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 2.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar, 2025
Table 2.4 *Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Agent/Seller of Fuel, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	LPG <i>LPG</i>	Tidak Ada <i>Non Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	6	0
Kebon Jeruk	1	7	0
Palmerah	0	6	0
Grogol Petamburan	0	7	0
Tambora	1	11	0
Taman Sari	2	8	0
Cengkareng	0	6	0
Kali Deres	0	5	0
Kab/Kota	4	56	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 2.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2025
Table 2.5 *Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Environmental Pollution, 2025*

Kecamatan District	Pencemaran Air Water Pollution	Pencemaran Tanah Soil Pollution	Pencemaran Udara Air Pollution	Tidak Ada Pencemaran No Pollution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	0	0	1	5
Kebon Jeruk	0	0	0	7
Palmerah	1	0	1	5
Grogol Petamburan	6	2	3	1
Tambora	1	0	0	10
Taman Sari	0	0	0	8
Cengkareng	2	0	1	4
Kali Deres	3	2	3	1
Kab/Kota	13	4	9	41

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table 2.6

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kecamatan dan Sumber Utama Pencemaran, 2025

Number of Villages/Subdistricts with Environmental Pollution by District and Main Source of Pollution, 2025

Kecamatan District	Sumber Pencemaran Air <i>The Source of Water Pollution</i>			Sumber Pencemaran Tanah <i>The Source of Soil Pollution</i>			Sumber Pencemaran Udara <i>The Source of Air Pollution</i>		
	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palmerah	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Grogol Petamburan	6	0	0	2	0	0	2	1	0
Tambora	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cengkareng	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Kali Deres	0	3	0	0	2	0	0	3	0
Kab/Kota	8	5	0	2	2	0	2	4	3



Tabel 2.7 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, 2025
Table 2.7 *Number Villages/Subdistricts by District and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities, 2025*

Kecamatan District	Penanaman/Pemeliharaan Pohon dan Mangrove <i>Planting/Maintenance of Trees and Mangroves</i>		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah <i>Waste Processing/Recycling</i>		Penggalian Penggunaan Pupuk Organik <i>Promoting the Use of Organic Fertilizers</i>	
	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	3	3	5	1	3	3
Kebon Jeruk	3	4	6	1	5	2
Palmerah	3	3	5	1	4	2
Grogol Petamburan	5	2	4	3	1	6
Tambora	5	6	9	2	4	7
Taman Sari	3	5	6	2	1	7
Cengkareng	4	2	5	1	1	5
Kali Deres	3	2	5	0	3	2
Kab/Kota	29	27	45	11	22	34

Tabel
Table2.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 2025
Number Villages/Subdistricts by District and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Pembuatan Lubang Biopori <i>Making Biopore Holes</i>		Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan <i>Utilisation of New and Renewable Energy</i>		Penerapan Pola Tanam <i>Implementation of Cropping Patterns</i>	
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	6	0	1	5	1	5
Kebon Jeruk	2	5	1	6	2	5
Palmerah	3	3	2	4	1	5
Grogol Petamburan	5	2	0	7	0	7
Tambora	6	5	0	11	1	10
Taman Sari	1	7	0	8	0	8
Cengkareng	4	2	1	5	1	5
Kali Deres	5	0	0	5	0	5
Kab/Kota	32	24	5	51	6	50



Lanjutan Tabel 2.8
Continued Table

Kecamatan District	Penampungan/Pemanenan Air Hujan Rainwater Harvesting/Collection		Pembuatan/Pemeliharaan Terasing Construction/Maintenance of Terraces	
	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kembangan	1	5	0	6
Kebon Jeruk	0	7	0	7
Palmerah	1	5	0	6
Grogol Petamburan	0	7	0	7
Tambora	1	10	0	11
Taman Sari	0	8	0	8
Cengkareng	1	5	0	6
Kali Deres	0	5	0	5
Kab/Kota	4	52	0	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Pendidikan dan kesehatan

Education and Health



55% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT TK
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH KINDERGARDEN



56% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SD
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH PRIMARY SCHOOL



53% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SMP
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH JUNIOR HIGH SCHOOL

44% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SMA/MA
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH SENIOR HIGH SCHOOL

47% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SMK
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH SENIOR HIGH SCHOOL

17% PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT PERGURUAN TINGGI
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH HIGHER EDUCATION INSTITUTION

21%



PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT RUMAH SAKIT
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH HOSPITAL

7%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT PUSKESMAS
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH PUBLIC HEALTH CENTER

13%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT KLINIK UTAMA
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS PRINCIPAL CLINIC

49%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT PUSKESMAS PEMBANTU
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH AUXILIARY CLINIC

49%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT KLINIK PRATAMA
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH PRIMARY CLINIC



Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education and Health

1. *Educational Institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and higher education. The kind of education taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and special education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah (MTs), or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of Senior High School (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Vocational School (SMK), and Vocational Madrasah Aliyah (MAK), or other equivalent forms.*
5. *The Higher Education is the education level after secondary education that consists of diploma, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the higher education institution*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

- Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
- Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
- Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat

(college). The Higher Education Institutions can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

- According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.
- A Hospital is an advanced-level healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).
- A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.
- A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public



atau pelayanan penunjang kesehatan. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

10. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
11. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
12. Puskesmas Non Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan

health services, centers can also provide individual health services. A Health Centre can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

10. *A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*
11. *A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a community health center (puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).*
12. *Non-inpatient community health centers are community health centers*



pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).

13. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.
14. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).
15. Praktik mandiri dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
16. Praktik mandiri bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan

that provide outpatient services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).

13. *A Auxiliary Health Centers (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.*
14. *A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).*
15. *An independent physician's practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.*
16. *An independent midwife practice is a health facility/building used as a*



- untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
17. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.
 17. Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.
 18. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.
 18. Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.
 19. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018).

A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning
 19. A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning



2018 tentang Apotek).

20. Toko Khusus Obat/Jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.
21. Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat di desa/kelurahan (Permenkes No 19 Tahun 2024).
22. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).

Pharmacies).

20. *A Traditional Drug Store is a designated location dedicated to storing and selling specific drugs/ingredients for drugs/herbal medicine. Drug/herbal medicine stores offer non-prescription and limited over-the-counter (OTC) medicine.*
21. *Posyandu (Integrated Health Post) is part of a village/subdistrict community organization that serves as a forum for community participation and partners with the village/subdistrict government in planning, implementing, and monitoring development and improving village services. Posyandu's role is to assist the village/subdistrict head in empowering the community, participating in development planning and implementation, and improving public health services in the village/subdistrict (Minister of Health Regulation No. 19 of 2024).*
22. *Integrated Guidance Post (Posbindu), currently known as Posbindu PTM (Integrated Non-Communicable Disease Post), is a community participation in carrying out early detection activities and monitoring of the main PTM risk factors which are carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines for Implementing Posbindu, Ministry of Health, 2012).*



Tabel 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan dan Jenis Sarana Pendidikan, 2025
Table 3.1 Number of Villages/Subdistricts with Availability Educational Facilities by District and Type of Educational Facilities, 2025

Kecamatan District	TK/RA/BA Kindergarten	SD/MI Elementary School	SMP/MTS Junior High School	SMA/MA Senior High School	SMK Vocational High School	Akademi/ Perguruan Tinggi Academy/ University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	6	6	6	6	6	1
Kebon Jeruk	7	7	7	5	6	3
Palmerah	6	6	6	4	5	2
Grogol Petamburan	7	7	7	6	6	5
Tambora	10	11	10	7	8	1
Taman Sari	8	8	6	6	5	0
Cengkareng	6	6	6	5	6	5
Kali Deres	5	5	5	5	5	0
Kab/Kota	55	56	53	44	47	17

Tabel
Table

3.2

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenis Sarana Kesehatan, 2025

Number of Villages/Subdistricts with by Availability of Health Facilities by District and Type of Health Facilities, 2025

Kecamatan District	Rumah Sakit Hospital	Klinik Utama Principal Clinic	Balai Kesehatan Health Center	Puskesmas ¹ Community Health Center ²	Puskesmas Pembantu Auxiliary Health Centers	Klinik Pratama Primary Clinic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	2	2	0	1	5	6
Kebon Jeruk	6	6	0	1	7	7
Palmerah	4	0	0	0	6	5
Grogol Petamburan	4	1	0	1	6	7
Tambora	1	0	0	1	9	8
Taman Sari	1	2	0	1	5	5
Cengkareng	1	2	0	1	6	6
Kali Deres	2	0	0	1	5	5
Kab/Kota	21	13	0	7	49	49

Catatan: ¹ Puskesmas mencakup puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.Note: ¹ Public Health Center includes public health center with hospitalization and without hospitalization.



Lanjutan Tabel 3.2
Continued Table

Kecamatan District	Praktik Mandiri Dokter Independent Physician Practice	Praktik Mandiri Bidan Independent Midwife Practice	Poskesdes Village Health Post	Polindes Village Maternity Post	Apotek Pharmacy	Toko Khusus Obat/Jamu Traditional Drugs Store
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kembangan	6	6	0	0	6	6
Kebon Jeruk	7	7	0	0	7	7
Palmerah	6	6	0	0	6	5
Grogol Petamburan	7	1	0	0	7	4
Tambora	10	6	0	0	11	10
Taman Sari	6	0	0	0	8	7
Cengkareng	6	6	0	0	6	6
Kali Deres	5	5	0	0	5	5
Kab/Kota	53	37	0	0	56	50

Tabel
Table

3.3

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kecamatan, 2025

Number of Villages/Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by District, 2025

Kecamatan District	Kegiatan Posyandu <i>The Activity of Integrated Health Post</i>		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) <i>Integrated Guidance Post</i>
	Setiap Sebulan Sekali <i>Once in a Month</i>	Setiap 2 Bulan/Lebih <i>Once in at Least Two Months</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	6	0	6
Kebon Jeruk	7	0	7
Palmerah	6	0	6
Grogol Petamburan	7	0	7
Tambora	10	2	11
Taman Sari	8	1	8
Cengkareng	6	1	6
Kali Deres	5	0	5
Kab/Kota	55	4	56

BAB Chapter

04

Angkutan, Komunikasi, dan Informasi *Transportation, Communication, and Information*

ANGKUTAN UMUM DI DESA/KELURAHAN *PUBLIC TRANSPORTATION IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*

56% Desa/kelurahan ada transportasi umum
Villages/subdistricts accessible by public transportation



56% Desa/kelurahan ada angkutan online
Villages/subdistricts accessible by online transportation

Base Transceiver Station **47% Excite** **9% NonExcite**



SINYAL TELEPON DAN SINYAL INTERNET DI DESA/KELURAHAN *PHONE AND INTERNET SIGNAL IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah
Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Cellular Phone Signal in Most Areas

Sangat Kuat 62,21%
Very Strong 62,21%

Kuat 37,79%
Strong 37,79%

Lemah 13,39% Tidak Ada 3,23%
Weak 13,39% No Signal 3,23%

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Internet di Sebagian Besar Wilayah
Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Internet Signal in Most Areas



SARANA KOMUNIKASI DI DESA/KELURAHAN *COMMUNICATION FACILITIES IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*



37% Desa/kelurahan ada kantor pos/pos pembantu/rumah pos
Villages/subdistricts with post office/sub-post office/post house



0% Desa/kelurahan ada layanan pos keliling
Villages/subdistricts with mobile postal service



56% Desa/kelurahan ada perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta
Villages/subdistricts with private expedition service



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

1. Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan/atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. Angkutan Umum adalah sarana angkutan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai titik asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Ketersediaan Angkutan *Online* di desa adalah kemampuan warga desa/kelurahan untuk mengakses dan memesan layanan transportasi daring berbasis aplikasi (misalnya Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya).
5. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada

Technical Notes Transportation, Communica- tion, and Information

1. *Transportation Infrastructure is defined as supporting facilities for the movement of people and/or goods, including roads, bridges, docks, ports, and other facilities that are utilized by villagers to ensure mobility to and from the nearest villages.*
2. *Public Transportation is a type of transportation for the movement of people and/or goods from one place to another using motor vehicles provided for public use on a fare-paying basis (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1993 on Road Transportation)."*
3. *Route is the designated path used by public vehicles in passenger-and-goods transport services, characterized by fixed point of origin and destination, a fixed path, and either a fixed or non-fixed timetable.*
4. *The Availability of Online Transportation in villages refers to the ability of villagers/subdistrict residents to access and order online transportation services based on applications (e.g. Gojek, Grab, Maxim, and others).*
5. *Type of Widest Road Surface is the widest road surface in the village/subdistrict.*



di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.

6. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver.
7. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
8. Sinyal internet telepon seluler adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, hingga 5G/4G/LTE.
9. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

The types of road surface including: asphalt/concrete, pebble (with gravel or stone), land, and others : such as made of wood/board that is usually used in swamp areas, including walkways, forest roads, etc.

6. *Cellular Phone Tower or Base Transceiver Station (BTS)* is a tool that serves as the sender and receiver (transceiver) of cellular communication signals. Usually, BTS is marked with a tower equipped with antenna as transceiver devices.
7. *Cellphone signal is electromagnetic quantities that change in space and time by bringing information that confirms when the cell phone services are available.*
8. *Cellphone internet signal is an internet package data system network with certain data transfer speeds. Data packages here are usually used to access the internet. This data transfer protocol has undergone several changes ranging from low to high speeds, namely 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, to 5G/4G/LTE.*
9. *Post Office is a service provider place of written communication and or electronic mail, parcel service, logistics services, financial transaction services, postal and agency services to the public.*



untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

10. Pos Keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
11. Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, dll.

Postal house has the same function as the post office and subsidiary of post office, the difference is that postal house usually located in remote areas.

10. *Mobile Postal Service is nomadic postal service (to sell, send, and receive postal stationery) by car or transportation facility that the functions are the same as the post office or subsidiary of post office.*
11. *Private Expedition Service Company is packages and documents delivery service managed by privates, for example Tiki, JNE, ESL, etc.*



Tabel 4.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Prasarana Transportasi, 2025
Table 4.1 *Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Transportation Infrastructure, 2025*

Kecamatan District	Darat Land	Air Water	Darat dan Air Land and Water	Udara Air	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 4.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Ketersediaan Angkutan Umum, 2025
Table 4.2 *Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Public Transportation, 2025*

Kecamatan District	Ada, Dengan Trayek Tetap dan Tanpa Trayek Tetap Available with Fixed Routes and without Fixed Routes	Ada, Dengan Trayek Tetap Available with Fixed Routes	Ada, Tanpa Trayek Tetap Available without Fixed Routes	Tidak Ada Angkutan Umum Not Available Public Transportation	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56



Tabel 4.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Ketersediaan Angkutan Online, 2025
Table 4.3 Number of Villages/Subdistricts by District and Availability of Online Transportation, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	6	0	6
Kebon Jeruk	7	0	7
Palmerah	6	0	6
Grogol Petamburan	7	0	7
Tambora	11	0	11
Taman Sari	8	0	8
Cengkareng	6	0	6
Kali Deres	5	0	5
Kab/Kota	56	0	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 4.4 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas, 2025
Table 4.4 Number of Villages/Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by District and Type of the Widest Road Surface, 2025

Kecamatan District	Aspal/Beton Asphalt/ Concrete	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll) Pebble	Tanah Land	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56

Tabel
Table

4.5

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS), 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and Existence of Base Transceiver Station (BTS), 2025

Kecamatan District	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	6	0	6
Kebon Jeruk	7	0	7
Palmerah	4	2	6
Grogol Petamburan	7	0	7
Tambora	7	4	11
Taman Sari	5	3	8
Cengkareng	6	0	6
Kali Deres	5	0	5
Kab/Kota	47	9	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 4.6 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler, 2025
Table 4.6 *Number of Villages/Subdistricts by District and the Strenght of Cellular Phone Signal, 2025*

Kecamatan District	Sangat Kuat Very Strong	Kuat Strong	Lemah Weak	Tidak Ada Sinyal No Signal	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56



Tabel 4.7 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kekuatan Sinyal Internet, 2025
Table 4.7 Number of Villages/Subdistricts by District and the Strength of Internet Signal, 2025

Kecamatan District	5G/4G/LTE 5G/4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO 3G/H/H+/ EVDO	2.5G/E/GPRS 2.5G/E/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet No Internet Signal	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	56



Tabel 4.8 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kecamatan, 2025
Table 4.8 *Number of Villages/Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by District, 2025*

Kecamatan District	Kantor Pos/Pos Pembantu/ Rumah Pos Post Office/Subsidiary of Post Office	Pos Keliling Mobile Postal Service	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta Private Expedition Service Company
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	6	0	6
Kebon Jeruk	6	0	7
Palmerah	6	0	6
Grogol Petamburan	2	0	7
Tambora	6	0	11
Taman Sari	2	0	8
Cengkareng	4	0	6
Kali Deres	5	0	5
Kab/Kota	37	0	56

Sarana Ekonomi dan Industri

Economic and Industrial Facilities



56 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT INDUSTRI MIKRO KECIL

56 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN SMALL MICRO INDUSTRIES

48 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT BANK UMUM PEMERINTAH

48 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN Government Bank

46 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT BANK UMUM SWASTA

46 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN Private Bank

56 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT SARANA MINIMARKET/SWALAYAN/ SUPERMARKET

56 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN MEANS Minimarket/Swalayan/ Supermarket

54 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT SARANA RESTORAN/RUMAH MAKAN

54 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN MEANS Restaurant/Food Stall

11 % DESA/KELURAHAN TERDAPAT KOPERASI SIMPAN PINJAM

11 % PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN Savings and Loan Cooperative



Penjelasan Teknis Sarana Ekonomi dan Industri

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400 m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah Makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa

Technical Notes Economic and Industry Facilities

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages consumed on its premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food Stall is a type of business that provides food services which food processing may be carried out outside the food stall premises, and customers are generally subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) for the general*



lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

public and operated commercially under a business license as a hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, and is managed commercially under a business license other than a hotel license.*
7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*
8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*
 - a. membership is voluntary and open;*
 - b. management is conducted democratically;*
 - c. distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
 - d. limited return on capital;*
 - e. Independence.*
9. *Credit Facility is a financial arrangement that enables an individual or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

10. Industri Mikro dan Kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja.

entity to borrow funds for purchasing products, with repayment made over an agreed period. Loans from individuals are excluded.

10. *Micro and Small Industries are industries that have fewer than 20 workers.*

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table

5.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kecamatan, 2025

Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by District, 2025

Kecamatan District	Sarana Perdagangan Trading Facility		Sarana Akomodasi Accommodation Facility	
	Minimarket/Swalayan/ Supermarket	Restoran/Rumah Makan	Hotel Hotel	Penginapan Lodging
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	6	6	3	6
Kebon Jeruk	7	7	3	7
Palmerah	6	6	5	4
Grogol Petamburan	7	6	7	6
Tambora	11	11	4	6
Taman Sari	8	7	8	7
Cengkareng	6	6	5	3
Kali Deres	5	5	1	0
Kab/Kota	56	54	36	39



Tabel 5.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2025
Table 5.2 Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Shopping Complexes and Markets, 2025

Kecamatan District	Kelompok Pertokoan Shopping Complexes	Pasar dengan Bangunan Permanen Markets in Permanent Building	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Markets in Semi Permanent Building	Pasar tanpa Bangunan Markets without Building	Tidak ada Kelompok Pertokoan dan Pasar No Shopping Complexes and Markets
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	4	3	1	0
Kebon Jeruk	6	4	0	5	0
Palmerah	3	4	4	2	1
Grogol Petamburan	7	5	3	0	0
Tambora	10	9	5	6	0
Taman Sari	7	7	2	2	0
Cengkareng	6	6	4	3	0
Kali Deres	5	5	5	3	0
Kab/Kota	50	44	26	22	1



Tabel 5.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Bank, 2025
Table 5.3 *Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Bank, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Jenis Bank <i>The Type of Bank</i>			Tidak Ada Bank <i>No Bank</i>
	Bank Umum Pemerintahan <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) <i>Rural Bank</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	6	5	1	0
Kelbon Jeruk	7	5	0	0
Palmerah	5	5	0	0
Grogol Petamburan	7	7	1	0
Tambora	7	8	1	1
Taman Sari	8	8	1	0
Cengkareng	4	5	0	0
Kali Deres	4	3	1	1
Kab/Kota	48	46	5	2

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 5.4 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kecamatan, 2025
Table 5.4 *Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Cooperatives by District, 2025*

Kecamatan District	Koperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Cooperative of Small- Scale Industries and Handicrafts	Koperasi Simpan Pinjam Savings and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	0	0	1	0
Kebon Jeruk	0	0	1	1
Palmerah	0	0	1	1
Grogol Petamburan	0	0	1	1
Tambora	0	0	3	1
Taman Sari	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	3	0
Kali Deres	0	0	1	0
Kab/Kota	0	0	11	4



Tabel 5.5 **Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kecamatan, 2025**
Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by District, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>People's Business Credit</i>	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) <i>Food and Energy Security Credit</i>	Kredit Usaha Kecil (KUK) <i>Small Business Credit</i>	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) <i>Joint Business Group (KUBE)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	6	0	0	0
Kebon Jeruk	7	0	6	1
Palmerah	6	0	2	0
Grogol Petamburan	6	0	0	0
Tambora	11	1	3	1
Taman Sari	8	0	0	0
Cengkareng	6	0	1	0
Kali Deres	5	2	3	1
Kab/Kota	55	3	15	3



Tabel 5.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kecamatan, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by District, 2025

Kecamatan District	Industri Mikro dan Kecil Micro and Small Industries	Sentra Industri Industrial Centres
(1)	(2)	(3)
Kembangan	6	0
Kebon Jeruk	7	0
Palmerah	6	0
Grogol Petamburan	7	0
Tambora	11	0
Taman Sari	8	1
Cengkareng	6	0
Kali Deres	5	0
Kab/Kota	56	1

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table

5.7

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Produk Barang Unggulan,
2025
Number of Villages/Subdistricts by District and the Availability of Leading Products, 2025

Kecamatan District	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	2	4	6
Kebon Jeruk	6	1	7
Palmerah	2	4	6
Grogol Petamburan	0	7	7
Tambora	2	9	11
Taman Sari	1	7	8
Cengkareng	3	3	6
Kali Deres	3	2	5
Kab/Kota	19	37	56

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Keuangan dan Aset Desa

Village Finances and Assets

0

Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Villages have BUMDes

Villages have BUMDes

0

Desa terdapat Bangunan Milik Desa
Villages have Village's Buildings

Villages have Village's Buildings

0

Desa terdapat Mata Air milik Desa
Villages have Village's Spring

Villages have Village's Spring

0

Desa memiliki Pasar Desa
Villages have Village's Market

Villages have Village's Market





Penjelasan Teknis Keuangan dan Aset Desa

1. Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
3. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa yang dicatat di Podes dapat berupa tanah kas desa/ulayat, tambatan perahu, pasar desa, bangunan milik desa, hutan milik desa, mata air milik desa, tempat wisata/pemandian umum, serta aset lainnya milik desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Technical Notes Village Financial and Assets

1. *The Village Information System includes village data, village development data, rural areas, and other information related to village development and rural area development. The Village Information System is managed by the Village Government and can be accessed by the village community and all stakeholders.*
2. *The Village Financial System (SISKEUDES) is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial management.*
3. *Village assets are items owned by the village that originate from the village's original wealth, are purchased or acquired using the Village Revenue and Expenditure Budget, or are obtained through other legal means. Village assets recorded in Podes can include village treasury land/customary land, boat moorings, village markets, village-owned buildings, village-owned forests, village-owned springs, tourist attractions/public bathing areas, and other village-owned assets.*
4. *Village regulations are laws and regulations established by the village head after discussion and agreement with the Village Consultative Agency.*



Tabel 6.1 **Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Sistem Informasi Desa, 2025**
Table 6.1 **Number of Villages by District and Availability of Village Information System, 2025**

Kecamatan District	Ada, Diperbaharui Available, Update	Ada, Tidak Diperbaharui Available, Not Update	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0
Palmerah	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0
Tambora	0	0	0
Taman Sari	0	0	0
Cengkareng	0	0	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 6.2 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa, 2025
Table 6.2 Number of Villages by District and Village Financial System, 2025

Kecamatan District	Ada, Diperbaharui Available, Update	Ada, Tidak Diperbaharui Available, Not Update	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0
Palmerah	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0
Tambora	0	0	0
Taman Sari	0	0	0
Cengkareng	0	0	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 6.3 Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kecamatan, 2025
Table 6.3 Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by District, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) <i>Village-Owned Enterprise (BUMDes)</i>	Tanah Kas Desa/Ulayat <i>Village's Communal Land</i>	Tambahan Perahu Mooring	Pasar Desa <i>Village's Market</i>	Bangunan Milik Desa <i>Village's Building</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	0	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0
Palmerah	0	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0
Tambora	0	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0	0	0



Lanjutan Tabel 6.3
Continued Table

Kecamatan <i>District</i>	Hutan Milik Desa <i>Village's Forest</i>	Mata Air Milik Desa <i>Village's Springs</i>	Tempat Wisata/ Pemandian Umum <i>Tourist Place/Public Bath</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kembangan	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0
Palmerah	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0
Tambora	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 6.4 **Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024**
Table 6.4 **Number of Villages by District and Availability of Village Regulation for 2024**

Kecamatan District	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0
Palmerah	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0
Tambora	0	0	0
Taman Sari	0	0	0
Cengkareng	0	0	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

Village/Subdistrict Government Information

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2025

Number of Villages/Subdistricts with the Existence of
the Village/Subdistrict Government by District, 2025

Kepala Desa/Lurah
Head of Village/
Subdistrict

52

Kepala Desa/Lurah Head of
Village/Subdistrict

**Sekretaris
Desa/Kelurahan**
Secretary of
Village/Subdistrict

54

Sekretaris Desa/Kelurahan
Secretary of Village/Subdistrict

Pelaksana Teknis
Technical Officers

56

Sekretaris Desa/Kelurahan
Secretary of Village/Subdistrict

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Kepala Desa/Lurah

Number of Villages/Subdistricts by Education
Attainment of Village/Subdistrict Head

Kurang dari SD

Below Elementary
School

0

desa/kelurahan
villages/subvillages



SD-SMP

Elementary
Junior High School

0

desa/kelurahan
villages/subvillages



SMA

Senior High
School

0

desa/kelurahan
villages/subvillages



Perguruan Tinggi

Higher
Education

22

desa/kelurahan
villages/subvillages



Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah

Number of Villages/Subdistricts by Age Group of
Village/Subdistrict Head





Penjelasan Teknis Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan terdiri dari sekretariat desa/kelurahan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
2. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa/kelurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa/kelurahan. Sekretaris desa/kelurahan bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Sekretariat Desa/Kelurahan dipimpin oleh sekretaris desa/kelurahan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit

Technical Notes Village/Subdistrict Government Information

1. *The Village/Subdistrict Government refers to the head of village/subdistrict, or any other equivalent designation, assisted by village/subdistrict officials who administer village/subdistrict governance. The village/subdistrict officials include the village/subdistrict secretariat, regional officers, and technical officers.*
2. *Head of Village/Subdistrict is a village/subdistrict government official who have the authority, duties and obligations to organize and manage their village households and carry out duties from the central and regional governments.*
3. *The Village/Subdistrict Secretary serves as the head of the village/subdistrict secretariat. The village/subdistrict secretary is responsible for assisting the head of village/subdistrict in government administration.*
4. *Village/Subdistrict Secretariat is led by village/subdistrict secretary and assisted by secretarial staff in assisting the head of village/subdistrict in public administration. The village/subdistrict secretariat consists of maximum 3 (three) divisions: administration and general affairs, financial affairs, and planning, and minimum 2 (two) divisions: general affairs and planning,*



2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

5. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

and financial affairs.

5. *Regional Officers serve as supporting elements to the head of village/subdistrict and act as territorial task units.*
6. *Technical Officers serve as supporting elements to the head of village/subdistrict and act as operational task unit. The technical officers consist of maximum three sections: the government section, the welfare section, and the public services section; or minimum two sections : the government section and the combined welfare and public services section.*



Tabel 7.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2025
Table 7.1 *Number of Villages/Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by District, 2025*

Kecamatan District	Kepala Desa/Lurah Head of Village/ Subdistrict	Sekretaris Desa/Kelurahan Secretary of Village/Subdistrict	Pelaksana Kewilayahan Regional Officers	Pelaksana Teknis Technical Officers
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	6	6	0	6
Kebon Jeruk	7	7	0	7
Palmerah	5	6	0	6
Grogol Petamburan	7	6	0	7
Tambora	10	11	0	11
Taman Sari	8	7	0	8
Cengkareng	5	6	0	6
Kali Deres	4	5	0	5
Kab/Kota	52	54	0	56

Tabel
Table

7.2

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by District and Sex, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Kepala Desa/Lurah <i>Head of Village/Subdistrict</i>			Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Secretary of Village/Subdistrict</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	6	0	6	5	1	6
Kebon Jeruk	7	0	7	7	0	7
Palmerah	4	1	5	4	2	6
Grogol Petamburan	5	2	7	6	0	6
Tambora	10	0	10	8	3	11
Taman Sari	7	1	8	4	3	7
Cengkareng	5	0	5	4	2	6
Kali Deres	4	0	4	3	2	5
Kab/Kota	48	4	52	41	13	54



Tabel 7.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by District and Age Group, 2025

Kecamatan District	≤ 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	0	2	1	0	3	6
Kebon Jeruk	0	0	4	1	2	7
Palmerah	0	0	3	1	1	5
Grogol Petamburan	0	3	0	4	0	7
Tambora	0	0	3	4	3	10
Taman Sari	0	0	4	2	2	8
Cengkareng	0	0	1	4	0	5
Kali Deres	0	0	1	1	2	4
Kab/Kota	0	5	17	17	13	52

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel
Table

7.4

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur, 2025

Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by District and Age Group, 2025

Kecamatan District	≤ 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	0	0	3	3	0	6
Kebon Jeruk	0	0	5	0	2	7
Palmerah	0	1	2	3	0	6
Grogol Petamburan	0	1	3	2	0	6
Tambora	0	1	3	5	2	11
Taman Sari	0	1	3	3	0	7
Cengkareng	0	0	4	2	0	6
Kali Deres	0	0	0	1	4	5
Kab/Kota	0	4	23	19	8	54

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 7.5 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by District and Education Attainment, 2025

Kecamatan District	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	0	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0
Palmerah	0	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0
Tambora	0	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0	0	0

Lanjutan Tabel
Continued Table 7.5

Kecamatan District	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/S1 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kembangan	0	1	5	0	6
Kebon Jeruk	0	1	6	0	7
Palmerah	0	3	2	0	5
Grogol Petamburan	0	3	4	0	7
Tambora	0	2	8	0	10
Taman Sari	0	4	4	0	8
Cengkareng	0	3	2	0	5
Kali Deres	0	3	1	0	4
Kab/Kota	0	20	32	0	52

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 7.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025
Table 7.6 *Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by District and Education Attainment, 2025*

Kecamatan District	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	0	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0
Palmerah	0	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0
Tambora	0	0	0	0	0
Taman Sari	0	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0	0
Kab/Kota	0	0	0	0	0

Lanjutan Tabel
Continued Table 7.6

Kecamatan District	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/51 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kembangan	0	1	5	0	6
Kebon Jeruk	0	1	6	0	7
Palmerah	0	3	3	0	6
Grogol Petamburan	0	3	3	0	6
Tambora	0	4	7	0	11
Taman Sari	0	4	3	0	7
Cengkareng	0	4	2	0	6
Kali Deres	0	2	3	0	5
Kab/Kota	0	22	32	0	54

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**Bencana Alam dan Gangguan
Keamanan**
*Natural Disasters and Security
Disturbances*



Banjir / Flood

22%

desa/kelurahan mengalami banjir
villages/subdistricts experience flooding



**Gempa bumi /
Earthquake**

0%

desa/kelurahan mengalami gempa bumi
villages/subdistricts experience earthquake



29%

Desa/kelurahan mengalami bencana alam
villages/subdistricts experience natural disaster

**Tanah longsor /
Landslide**

4%

desa/kelurahan mengalami tanah longsor
villages/subdistricts experience landslide

**Angin puyuh /
Typhon**

3%

desa/kelurahan mengalami angin puyuh
villages/subdistricts experience typhon

*Periode bencana alam adalah pada 2024 hingga Mei 2025 / *The natural disaster period is from 2024 to May 2025*



Penjelasan Teknis Bencana Alam dan Gangguan Keamanan

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2024 hingga Mei 2025. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan abrasi, sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dan sebagainya, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll, adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21

Technical Notes Natural Disaster and Security Disturbance

1. *Natural Disaster is an event or series of disaster events that occurred in the period from January 2024 to May 2025 that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors such as: landslides, floods, flash floods, earth-quake, tsunami, tide, typhoons/cyclone, volcanic eruptions, forest and land fires, drought, and abrasion, so it can lead to result in loss of material and non-material.*
2. *Natural Disaster Early Warning System is a series of activities warnings about the possibility of a natural disaster to local community by regulatory authorities. The natural disaster early warning system referred here is early warning to residents regarding the status of sluice height, mountain status, etc., which is conveyed through kentongan, notification with loud speakers, and others.*
3. *Construction, Maintenance or Normalization: Rivers, Canals, Embankments, etc, are activities that are examples of what can be done as disaster prevention efforts. According to Government Regulation Number 21 of 2008 concerning Implementation*



Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.
5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta,

of Disaster Management, prevention is carried out by reducing the threat of disasters and the vulnerability of those threatened by disaster.

4. *Tsunami Early Warning System is a facility of early detection of tsunami occurrence to provide early warning for the population before the tsunami hit the village/subdistrict. This system uses high technology equipment as a tool to monitor when and where the tsunami will occur. The coverage area of the tsunami early warning system covers all villages/subdistricts that can be reached by the system and not just the village/subdistrict where the location of the equipment is located.*
5. *Safety Equipment is equipment that sought/provided by local apparatus or village community to anticipate the occurrence of natural disasters, such as providing rubber boats, tents, masks stock, etc.*
6. *Evacuation Route is a path or a special route that is used for evacuation when a natural disaster is occurred. These routes could be available in the village in any form, e.g. maps, evacuation instructions, and muster point. The most important thing is that in case of a natural disaster,*



petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

7. Pupuk Kimia atau Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011).
8. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman (Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman).
9. Cuaca Ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta (Peraturan BMKG No. 9 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem).
10. Penggundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dan Lainnya adalah kegiatan penebangan atau alih fungsi hutan menjadi permukiman,

the villagers have clear evacuation route that must be followed.

7. *Chemical or Inorganic Fertilizers are fertilizers produced through chemical, physical, and/or biological engineering processes and are manufactured by the fertilizer industry or factories (Minister of Agriculture Regulation No. 43/Permentan/SR.140/8/2011).*
8. *Pesticides are chemical substances or compounds, growth regulators and stimulants, other materials, and microorganisms or viruses used to protect plants (Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems).*
9. *Extreme Weather is a natural phenomenon characterized by rainfall, wind direction and speed, air temperature, humidity, and visibility that can result in losses, especially to life and property (BMKG Regulation No. 9 of 2022 concerning the Provision and Dissemination of Early Warnings for Extreme Weather).*
10. *Deforestation for Settlement, Plantations, Mining, and Other Purposes is the clearing or conversion of forests into settlements, plantations,*



kebun, atau lahan tambang yang menyebabkan berkurangnya daya serap karbon dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

11. Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida adalah penggunaan bahan kimia sintetis dalam kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca serta menimbulkan pencemaran tanah dan air.
12. Pembakaran atau Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal adalah praktik membakar atau membuang sampah di lokasi tidak resmi yang menimbulkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) serta mencemari lingkungan sekitar.
13. Peningkatan Jumlah Pabrik dan Industri adalah penambahan fasilitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui proses produksi dan pembakaran bahan bakar fosil.
14. Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang penyumbang utama pemanasan global dan pencemaran udara.
15. Kelangkaan Air akibat Kemarau Panjang adalah kondisi berkurangnya ketersediaan air bersih di desa/kelurahan akibat kemarau panjang dan perubahan pola hujan yang tidak menentu.

or mining sites, resulting in reduced carbon sequestration and increased greenhouse gas emissions.

11. *Use of Chemical Fertilisers and Pesticides is the use of synthetic chemicals in agricultural activities that can produce greenhouse gas emissions and cause soil and water pollution.*
12. *Burning or Disposal of Waste in Illegal Locations is the practice of burning or disposing of waste in unauthorised locations, which causes emissions of carbon dioxide (CO₂) and methane (CH₄) and pollutes the surrounding environment.*
13. *Increase in the Number of Factories and Industries is the addition of industrial facilities that produce greenhouse gas emissions through production processes and the burning of fossil fuels.*
14. *Increase in the Ownership of Four-Wheel or More Motor Vehicles is the increase in the number of motor vehicles that produce exhaust emissions, which are a major contributor to global warming and air pollution.*
15. *Water scarcity due to prolonged drought is a condition in which the availability of clean water in villages/subdistricts is reduced due to prolonged drought and unpredictable rainfall patterns.*



16. Kesulitan Bertani atau Melaut adalah situasi ketika aktivitas pertanian atau perikanan terganggu akibat kekeringan, serangan hama, perubahan musim, atau cuaca laut yang ekstrem.
 17. Kehilangan Mata Pencaharian yang Bergantung pada Alam adalah kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata alam, akibat dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, atau bencana lainnya.
 18. Gangguan Kesehatan akibat Perubahan Iklim adalah kasus penyakit seperti pneumonia, malaria, atau DBD yang meningkat di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir akibat perubahan iklim.
 19. Kerusakan Rumah/Harta Benda akibat Bencana Terkait Iklim adalah kerusakan fisik pada rumah dan barang milik warga akibat bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, atau kebakaran hutan.
 20. Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim adalah kondisi di mana hasil pertanian atau peternakan menurun drastis atau hilang akibat cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, atau perubahan suhu yang tidak menentu.
16. *Difficulties in Farming or Fishing are situations where agricultural or fishing activities are disrupted due to drought, pest infestations, seasonal changes, or extreme sea conditions.*
 17. *Loss of Nature-Dependent Livelihoods refers to the loss of jobs or sources of income that depend on natural resources, such as agriculture, fisheries, forestry, plantations, mining, or nature-based tourism, due to the impacts of climate change, such as floods, droughts, forest fires, or other disasters.*
 18. *Health Problems due to Climate Change are cases of diseases such as pneumonia, malaria, or dengue fever that have increased in villages/subdistricts in the last 5 years due to climate change.*
 19. *Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters is physical damage to residents' houses and property due to climate-related disasters such as floods, landslides, tornadoes, droughts, or forest fires.*
 20. *Crop Failure, Crop Damage, or Livestock Deaths due to Climate-Related Disasters are conditions in which agricultural or livestock yields decline drastically or are lost due to extreme weather, drought, floods, or erratic temperature changes.*



21. Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku atau melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya. Perkelahian massal biasanya melibatkan: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.
22. Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai.
23. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
24. Aparat Pemerintah meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya.
25. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya.
26. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya.
21. *A Mass Brawl is a fight that occurs on a large scale, involving many people or at least two people per group. Mass brawls typically involve: intergroup violence, students, interethnic groups, or other incidents that have occurred in a village over the past year.*
22. *The Initiator of the Resolution of Mass brawl is a person or group of people who actively takes the initiative to reconcile the masses who are fighting.*
23. *Security Forces include the police, military (TNI), Civil Service Police Unit (Satpol PP), Security Unit (Satpam), and so on.*
24. *Government Official includes the local government officials, subdistrict, village, and so on.*
25. *Community Figure is someone who has influence or authority in their communities. For example: Head of RT/RW, traditional leader or community organization leader (Organisasi Masyarakat), and so on.*
26. *Religious Leader is someone who have charisma in their religion and serves as a role model for those around them. For example: Ustadz, Pastor, and so on.*



Tabel 8.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster, 2025

Kecamatan District	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Natural Disaster Early Warning System	Sistem Peringatan Dini Tsunami Tsunami Early Warning System	Perlengkapan Keselamatan Safety Equipment	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Signs and Evacuation Route	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll Construction, Maintenance, or Normalization: Rivers, Canals, Embankment, etc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	5	0	5	5	5
Kebon Jeruk	7	0	7	5	7
Palmerah	2	0	6	5	5
Grogol Petamburan	1	0	6	6	6
Tambora	6	0	10	4	8
Taman Sari	0	0	7	7	2
Cengkareng	5	0	6	6	6
Kali Deres	4	0	5	5	4
Kab/Kota	30	0	52	43	43



Tabel 8.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana Alam, 2025¹
Table 8.2 *Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Natural Disaster, 2025¹*

Kecamatan <i>District</i>	Tanah Longsor <i>Landslide</i>	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Gempa Bumi <i>Earth-quake</i>	Tsunami	Gelombang Pasang Laut <i>Tide</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	0	5	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	7	0	0	0	0
Palmerah	0	1	0	0	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0	0
Tambora	1	1	0	0	0	0
Taman Sari	2	1	0	0	0	0
Cengkareng	0	6	0	0	0	0
Kali Deres	1	1	0	0	0	0
Kab/Kota	4	22	0	0	0	0

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi pada Januari 2024 - Mei 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions in January 2024 - May 2025.



Lanjutan Tabel 8.2
Continued Table

Kecamatan District	Angin Puyuh/ Puting Beluung/Topan Typhoon Cyclone	Gunung Meletus Volcanic Eruption	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest and Land Fires	Kekeringan Drought	Abrasi Abrasion	Tidak Ada Bencana Alam No Natural Disaster
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kembangan	0	0	0	0	0	1
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0	0
Palmerah	1	0	0	0	0	4
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0	7
Tambora	0	0	0	0	0	10
Taman Sari	0	0	0	0	0	5
Cengkareng	0	0	0	0	0	0
Kali Deres	2	0	0	0	0	1
Kab/Kota	3	0	0	0	0	28

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi pada Januari 2024 - May 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions in January 2024 - May 2025.



Tabel 8.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kecamatan, 2025¹
Number of Villages/Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by District, 2025¹

Kecamatan <i>District</i>	Pengundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dll <i>Deforestation for Settlements, Plantations, Mines, etc.</i>	Peningkatan Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida <i>Increased Use of Chemical Fertilisers and Pesticides</i>	Peningkatan Pembakaran dan Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal <i>Increased Burning and Disposal of Waste in Illegal Dumpsites</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	1
Palmerah	0	0	2
Grogol Petamburan	0	0	0
Tambora	0	0	0
Taman Sari	0	0	0
Cengkareng	0	0	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	0	0	3

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Lanjutan Tabel 8.3
Continued Table 8.3

Kecamatan District	Peningkatan Jumlah Fabrik dan Industri Increase in the Number of Factories and Industries	Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Increase in Ownership of Motor Vehicles with Four or More Wheels
(1)	(5)	(6)
Kembangan	0	3
Kebon Jeruk	0	6
Palmerah	1	5
Grogol Petamburan	0	7
Tambora	0	8
Taman Sari	1	6
Cengkareng	1	5
Kali Deres	0	0
Kab/Kota	3	40

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podest 2025.
Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podest 2025 activity.

Tabel
Table

8.4

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kecamatan, 2025¹*Number of Villages/Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by District, 2025¹*

Kecamatan District	Kelangkaan Air Akibat Kemarau Panjang Water Scarcity due to Prolonged Drought	Kesulitan Bertani/Melaut (Hama, Kemarau, Cuaca Ekstrem) Difficulty in Farming/Fishing (Pests, Drought, Extreme Weather)	Kehilangan Mata Pencarian yang Bergantung pada Alam Loss of Livelihoods Dependent on Nature
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	1	0
Kebon Jeruk	0	0	0
Palmerah	2	0	0
Grogol Petamburan	0	0	0
Tambora	1	0	0
Taman Sari	1	0	0
Cengkareng	0	0	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	4	1	0

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Lanjutan Tabel 8.4
Continued Table

Kecamatan District	Gangguan Kesehatan (Pneumonia, Malaria, DBD) Health Problems (Pneumonia, Malaria, Dengue)	Kerusakan Rumah/Harta Benda Akibat Bencana Terkait Iklim Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters	Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim Crop Failure or Livestock Death due to Climate-Related Disasters
(1)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	1	1	0
Kebon Jeruk	3	1	0
Palmerah	6	2	0
Grogol Petamburan	1	1	0
Tambora	7	0	0
Taman Sari	2	0	0
Cengkareng	2	2	0
Kali Deres	0	0	0
Kab/Koa	22	7	0

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Tabel 8.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal, 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and the Occurrence of Mass Fight, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ada <i>Present</i>	Tidak Ada <i>Not Present</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	6	6
Kebon Jeruk	0	7	7
Palmerah	3	3	6
Grogol Petamburan	0	7	7
Tambora	2	9	11
Taman Sari	0	8	8
Cengkareng	0	6	6
Kali Deres	0	5	5
Kab/Kota	5	51	56

Catatan: ¹ Data provinsi tidak mencakup sebagian desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan lainnya. Secara nasional, terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah.

Note: ¹ Provincial data does not include some villages/subdistricts that were not successfully enumerated due to security and other constraints. Nationally, there are 152 villages/subdistricts that have not successfully enumerated.



Tabel 8.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kecamatan dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka, 2025
Table 8.6 Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by District and the Presence of Fatalities and Injuries, 2025

Kecamatan District	Meninggal Fatalities			Luka-Luka Injuries		
	Ada Present	Tidak Ada Not Present	Jumlah Total	Ada Present	Tidak Ada Not Present	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	0	0	0	0	0	0
Kebon Jeruk	0	0	0	0	0	0
Palmerah	0	3	3	2	1	3
Grogol Petamburan	0	0	0	0	0	0
Tambora	0	2	2	0	2	2
Taman Sari	0	0	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	0	0	0	0
Kali Deres	0	0	0	0	0	0
Kab/Kota	0	5	5	2	3	5

Catatan: ¹ Data provinsi tidak mencakup sebagian desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan lainnya. Secara nasional, terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah.

Note: ¹ Provincial data does not include some villages/subdistricts that were not successfully enumerated due to security and other constraints. Nationally, there are 152 villages/subdistricts that have not successfully enumerated.

Tabel
Table

8.7

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kecamatan dan Inisiator Penyelesaiannya, 2025

Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by District and Initiator of the Resolution, 2025

Kecamatan District	Aparat Keamanan Security Forces	Aparat Pemerintah Government Official	Tokoh Masyarakat Community Figure	Tokoh Agama Religious Figure	Lainnya Others	Tidak Ada Inisiator No Initiator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	6	6	6	6	0	6
Kebon Jeruk	7	7	7	7	0	7
Palmerah	5	5	5	5	0	4
Grogol Petamburan	7	7	7	7	0	7
Tambora	10	10	10	11	0	10
Taman Sari	8	8	8	8	0	8
Cengkareng	6	6	6	6	0	6
Kali Deres	5	5	5	5	0	5
Kab/Kota	54	54	54	55	0	53

Catatan: ¹ Data provinsi tidak mencakup sebagian desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan lainnya. Secara nasional, terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah.

Note: ¹ Provincial data does not include some villages/subdistricts that were not successfully enumerated due to security and other constraints. Nationally, there are 152 villages/subdistricts that have not successfully enumerated.



Tabel 8.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2025
Number of Villages/Subdistricts by District and Type of Citizen's Effort to Secure Community, 2025

Kecamatan District	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan Building/ Maintenance Security Post	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan Establishing Security Guard	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam Reporting Guests Staying More Than 24 Hours	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga Activation of Security System from Citizen Initiative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kembangan	6	4	3	6	6
Kebon Jeruk	7	7	1	7	7
Palmerah	5	5	3	6	6
Grogol Petamburan	3	3	0	4	6
Tambora	11	7	8	10	10
Taman Sari	5	6	4	8	7
Cengkareng	6	6	5	6	6
Kali Deres	5	5	0	5	5
Kab/Kota	48	43	24	52	53

Catatan: ¹ Data provinsi tidak mencakup sebagian desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan lainnya. Secara nasional, terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah.

Note: ¹ Provincial data does not include some villages/subdistricts that were not successfully enumerated due to security and other constraints. Nationally, there are 152 villages/subdistricts that have not successfully enumerated.

Infrastruktur Pendidikan

Educational Infrastructure

JUMLAH SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF SCHOOLS BY EDUCATIONAL LEVEL.

SD/MI

Elementary Schools

648

Negeri
Public

700

Swasta
Private

SMP/MTs

Junior High Schools

118

Negeri
Public

530

Swasta
Private

SMA/MA

Senior High Schools

46

Negeri
Public

236

Swasta
Private

SMK

Vocational Schools

10

Negeri
Public

111

Swasta
Private

**AKADEMI/PERGURUAN
TINGGI**

Academy/University

0

Negeri
Public

34

Swasta
Private



Penjelasan Teknis Infrastruktur Pendidikan

1. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education Infrastructure

1. *Educational institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and high education. The kind of education that taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and specific education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah, or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of the senior high school, Madrasah Aliyah, Vocational School, and Vocational Madrasah Aliyah, or other equivalent forms.*
5. *The High Education consists of the education level after the secondary education that consists of diplomas, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the college. The*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

colleges can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 9.1 Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025
Table 9.1 *Number of Public and Private Elementary Schools by District, 2025*

Kecamatan District	SD Elementary School			MI Madrasah Ibtidaiyah			SD/MI Elementary School/Madrasah Ibtidaiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kembangan	35	33	68	1	17	18	36	50	86
Kebon Jeruk	37	28	65	0	17	17	37	45	82
Palmerah	38	12	50	0	8	8	38	20	58
Grogol Petamburan	25	25	50	0	3	3	25	28	53
Tambora	27	35	62	0	12	12	27	47	74
Taman Sari	21	14	35	0	2	2	21	16	37
Cengkareng	75	46	121	1	26	27	76	72	148
Kali Deres	62	45	107	2	27	29	64	72	136
Total	320	238	558	4	112	116	324	350	674



Tabel 9.2 Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025
Table 9.2 *Number of Public and Private Junior High Schools by District, 2025*

Kecamatan District	SMP Junior High School			MTs Madrasah Tsanawiyah			SMP/MTs Junior High School/Madrasah Tsanawiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kembangan	7	34	41	1	5	6	8	39	47
Kebon Jeruk	8	26	34	1	5	6	9	31	40
Palmerah	5	10	15	1	4	5	6	14	20
Grogol Petamburan	6	26	32	1	1	2	7	27	34
Tambora	3	23	26	0	1	1	3	24	27
Taman Sari	2	9	11	0	0	0	2	9	11
Cengkareng	9	50	59	3	9	12	12	59	71
Kali Deres	10	51	61	2	11	13	12	62	74
Kab/Kota	50	229	279	9	36	45	59	265	324



Tabel 9.3 Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025
Table 9.3 *Number of Public and Private Senior High Schools by District, 2025*

Kecamatan District	SMA Senior High School			MA Madrasah Aliyah			SMA/MA Senior High School/Madrasah Aliyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kembangan	3	16	19	1	1	2	4	17	21
Kebon Jeruk	2	15	17	0	4	4	2	19	21
Palmerah	2	4	6	1	0	1	3	4	7
Grogol Petamburan	1	16	17	1	0	1	2	16	18
Tambora	1	9	10	0	0	0	1	9	10
Taman Sari	2	4	6	0	0	0	2	4	6
Cengkareng	2	21	23	2	2	4	4	23	27
Kali Deres	4	22	26	1	4	5	5	26	31
Kab/Kota	17	107	124	6	11	17	23	118	141



Tabel 9.4 Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025
Table 9.4 Number of Public and Private Vocational Schools by District, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	13	13
Kebon Jeruk	2	13	15
Palmerah	2	8	10
Grogol Petamburan	0	15	15
Tambora	1	9	10
Taman Sari	3	6	9
Cengkareng	2	23	25
Kali Deres	0	24	24
Kab/Kota	10	111	121

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 9.5 Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2025
Table 9.5 *Number of Public and Private Academy/University by District, 2025*

Kecamatan District	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	2	2
Kebon Jeruk	0	6	6
Palmerah	0	2	2
Grogol Petamburan	0	14	14
Tambora	0	1	1
Taman Sari	0	0	0
Cengkareng	0	9	9
Kali Deres	0	0	0
Kab/Kota	0	34	34

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Infrastruktur kesehatan

Health Infrastructure



29

BANYAKNYA RUMAH SAKIT
NUMBER OF HOSPITALS

17

BANYAKNYA KLINIK UTAMA
NUMBER OF PRINCIPAL CLINIC

201

BANYAKNYA KLINIK PRATAMA
NUMBER OF PRIMARY CLINIC

8

BANYAKNYA PUSKESMAS
NUMBER OF PUBLIC HEALTH CENTERS





Penjelasan Teknis Infrastruktur Kesehatan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
2. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
3. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
4. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan.

Technical Notes Health Infrastructure

1. *According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.*
2. *A Hospital is an advanced healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*
3. *A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.*
4. *A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public health services, centers can also provide individual health services. A Health*



Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

5. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
6. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
7. Puskesmas tanpa Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan

Center can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

5. *A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*
6. *A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a Community Health Center (Puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).*
7. *A Community Health Center (Puskesmas) without Inpatient Care are community health centers that provide outpatient*



- di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).
8. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengkoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.
 9. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).
 10. Praktik Mandiri Dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
 11. Praktik Mandiri Bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan
- services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).*
8. *A Auxiliary Health Center (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.*
 9. *A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).*
 10. *An Independent Physician Practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.*
 11. *An Independent Midwife Practice is a health facility/building used as a*



untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

12. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
13. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
14. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Apotek).

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.

12. *Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.*
13. *Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.*
14. *A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Pharmacies).*



Tabel 10.1 Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kecamatan, 2025
Table 10.1 *Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by District, 2025*

Kecamatan District	Rumah Sakit Hospital	Klinik Utama Principal Clinic	Balai Kesehatan Health Center
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	2	2	0
Kebon Jeruk	7	10	0
Palmerah	5	0	0
Grogol Petamburan	5	1	0
Tambora	1	0	0
Taman Sari	1	2	0
Cengkareng	2	2	0
Kali Deres	6	0	0
Kab/Kota	29	17	0

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 10.2 Banyaknya Puskesmas Menurut Kecamatan, 2025
Table 10.2 Number of Public Health Center by District, 2025

Kecamatan District	Puskesmas dengan Rawat Inap Community Health Center with Inpatient Care	Puskesmas tanpa Rawat Inap Community Health Center without Inpatient Care	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	0	1	1
Kebon Jeruk	1	1	2
Palmerah	0	0	0
Grogol Petamburan	0	1	1
Tambora	0	1	1
Taman Sari	0	1	1
Cengkareng	0	1	1
Kali Deres	0	1	1
Kab/Kota	1	7	8

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 10.3 Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kecamatan, 2025
Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by District, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Klinik Pratama <i>Primary Clinic</i>	Tempat Praktik Dokter <i>Independent Physician Practice</i>	Tempat Praktik Bidan <i>Independent Midwife Practice</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	42	39	27	54
Kebon Jeruk	30	23	18	56
Palmerah	17	22	9	20
Grogol Petamburan	18	106	1	33
Tambora	21	41	10	26
Taman Sari	14	15	0	39
Cengkareng	34	46	36	53
Kali Deres	25	32	25	21
Total	201	324	126	302

<https://jakbarkota.bps.go.id>

INFRASTRUKTUR EKONOMI

Economic Infrastructure





Penjelasan Teknis Infrastruktur Ekonomi

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll)

Technical Notes Economy Infrastructure

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages for consumption on the premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food stall is a type of business that provides food services where food processing can be done outside the food stall, characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) to the general public, managed commercially with a*



bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

business license as a hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, managed commercially with a business license other than a hotel.*
7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*
8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*
 - a. membership is voluntary and open;*
 - b. management is conducted democratically;*
 - c. distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
 - d. limited return on capital;*
 - e. Independence.*
9. *Credit facilities are financial facilities that enable individuals or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

entities to borrow money to purchase products and repay it within a specified period. This does not include loans from individuals.

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 11.1 Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kecamatan, 2025
Table 11.1 Number of Shopping Complexes And Markets by District, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complexes</i>	Pasar dengan Bangunan Permanen <i>Markets in Permanent Building</i>	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen <i>Markets in Semi Permanent Building</i>	Pasar tanpa Bangunan <i>Markets without Building</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kembangan	36	4	4	1
Kebon Jeruk	20	4	0	6
Palmerah	9	5	5	3
Grogol Petamburan	41	6	4	0
Tambora	14	14	6	6
Taman Sari	12	9	2	2
Cengkareng	63	9	12	6
Kali Deres	36	9	10	3
Kab/Kota	231	60	43	27

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 11.2 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan, 2025
Table 11.2 Number of Trading Facilities by District, 2025

Kecamatan District	Minimarket/Swalayan/Supermarket Minimarket/Swalayan/Supermarket	Restoran/Rumah Makan Restaurant/Food Stall
(1)	(2)	(3)
Kembangan	115	247
Kebon Jeruk	106	64
Palmerah	63	59
Grogol Petamburan	95	126
Tambora	67	90
Taman Sari	67	114
Cengkareng	94	93
Kali Deres	80	48
Kab/Kota	687	841

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 11.3 Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kecamatan, 2025
Table 11.3 *Number of Acomodation Facilities by District, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Hotel <i>Hotel</i>	Penginapan <i>Inn</i>
(1)	(2)	(3)
Kembangan	4	13
Kebon Jeruk	4	11
Palmerah	10	89
Grogol Petamburan	20	18
Tambora	8	30
Taman Sari	62	79
Cengkareng	8	8
Kali Deres	2	0
Kab/Kota	118	248

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 11.4 Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kecamatan, 2025
Table 11.4 *Number of Bank Facilities by District, 2025*

Kecamatan <i>District</i>	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Bank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	35	42	1
Kebon Jeruk	26	45	0
Palmerah	10	8	0
Grogol Petamburan	33	66	1
Tambora	22	51	1
Taman Sari	24	19	1
Cengkareng	25	31	0
Kali Deres	10	15	1
Kab/Kota	185	277	5

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Tabel 11.5 Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kecamatan, 2025
Table 11.5 *Number of Cooperative by District, 2025*

Kecamatan District	Kooperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative	Koperasi Simpan Pinjam Saving and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Kembangan	0	0	1	0
Kebon Jeruk	0	0	1	1
Palmerah	0	0	2	1
Grogol Petamburan	0	0	1	1
Tambora	0	0	5	1
Taman Sari	0	0	0	0
Cengkareng	0	0	7	0
Kali Deres	0	0	1	0
Kab/Kota	0	0	18	4

<https://jakbarkota.bps.go.id>



Daftar Pustaka

Bibliography

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 1: Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 3: Pedoman Konsep dan Definisi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://jakbarkota.bps.go.id>



LAMPIRAN

APPENDIX



Lampiran Appendix 1. Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut Kecamatan¹
Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) by District¹

Kecamatan District	Jumlah Total			Persentase (%) Percentage (%)		
	Berhasil Dicacah Successfully Enumerated	Tidak Berhasil Dicacah Not Successfully Enumerated	Jumlah Total	Berhasil Dicacah Successfully Enumerated	Tidak Berhasil Dicacah Not Successfully Enumerated	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kembangan	6	0	0	0	0	6
Kebon Jeruk	7	0	0	0	0	7
Palmerah	6	0	0	0	0	6
Grogol Petamburan	7	0	0	0	0	7
Tambora	11	0	0	0	0	11
Taman Sari	8	0	0	0	0	8
Cengkareng	6	0	0	0	0	6
Kali Deres	5	0	0	0	0	5
Kab/Kota	56	0	0	0	0	56

Catatan: ¹ Cakupan yang dihitung adalah desa/kelurahan yang berstatus operasional

Note: ¹ The coverage calculated is villages/sub-districts with operational status.



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA 2025

RAHASIA

PODES2025-DESA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota *)			<input type="text"/>
103	Kecamatan			<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan *)			<input type="text"/>
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	<input type="checkbox"/>
106	SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/>
	Per merdagri/Kepmendagri	-1	SK Gubernur/Dupati	-4
	Berdasarkan Provinsi	-2	Lainnya	-5
	Berdasarkan Kabupaten	-3		
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/>
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	<i>Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2 maka lanjutkan ke R201 sampai R207 kemudian STOP</i>			
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:			
	a. Alamat lengkap	<input type="text"/>		
	b. Nomor telepon	<input type="text"/>		
	c. Alamat e-Mail	<input type="text"/>		
	d. Kode Pos	<input type="text"/>		
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		202	NIP/NIM <input type="text"/>
203	Tanggal Kunjungan			
	No. Tanggal Kunjungan			
204	Nama Pengawas/ Pemeriksa		205	NIP/NIM <input type="text"/>
206	Tanggal Pemeriksaan	<input type="text"/>		
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG
DAN RELEVAN, SERTA PENELUSURAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN

..... 2025
Mengetahui
Kepala Desa/Lurah*)

Nama dan Stempel

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN				
301	Status pemerintahan: Desa -1 Kelurahan -2 UPT/SPT -3 Nagari -4			<input type="checkbox"/>
302	a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: Ada -1 Tidak ada -2 b. Jika berbatasan dengan laut, pemanfaatan laut: 1) Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) Ada -1 Tidak ada -2 2) Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) Ada -1 Tidak ada -2 3) Tambak garam Ada -1 Tidak ada -2 4) Wisata bahari Ada -1 Tidak ada -2 5) Transportasi umum Ada -1 Tidak ada -2			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
303	a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan/hutan: Di dalam kawasan hutan -1 Di tepi/sekitar kawasan hutan -2 Di luar kawasan hutan -3 → R401 b. Fungsi kawasan hutan/hutan: Pilihan boleh lebih dari satu kode. Konservasi -A Lindung -B Produktif -C			<input type="checkbox"/>
304	a. Jumlah Rukun Warga (RW) di desa/kelurahan b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di desa/kelurahan		<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
IV. KEPENDUDUKAN				
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2025: a. Jumlah penduduk laki-laki b. Jumlah penduduk perempuan c. Jumlah keluarga d. Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	orang orang keluarga keluarga
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik: 1. PLN (Perusahaan Listrik Negara) 2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan) b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	keluarga keluarga keluarga
502	a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: Ada, sebagian besar -1 Ada, sebagian kecil -2 Tidak ada -3 → R503 b. Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan: Listrik diusahakan oleh pemerintah -1 Listrik diusahakan oleh non pemerintah -2 Non listrik -3			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
503	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga: Elektrik -1 Gas kota -5 Arang -9 Elpgas 5,5 kg -2 Biogas -6 Kayu bakar -10 Elpgas 12 kg -3 Minyak tanah -7 Lainnya -11 Elpgas 3 kg -4 Briquet -8			<input type="text"/> <input type="text"/>
504	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir:	Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)		
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan Hidup Ada -1 Tidak ada -2	Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama Rumah tangga -1 Pabrik/industri/usaha -2 Lainnya -3	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan Ada -1 Tidak ada -2
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Udara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

505	Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim selama setahun terakhir								
	Jenis Kegiatan		Ada, warga terlibat		-1				
			Ada, warga tidak terlibat		-2				
			Tidak ada kegiatan		-3				
	(1)		(2)						
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan reboisasi di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>						
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>						
	c. Penggunaan pupuk organik di lahan pertanian di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>						
	d. Pembuatan lubang biopori di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>						
	e. Pemanfaatan energi baru terbarukan (tenaga surya/angin/mikrohidro/biogas/biomassa/pasang surut/arus laut) di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>						
f. Penerapan pola tanam (rotasi tanaman, tumpang sari dll) di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>							
g. Pensampungan/pemanenan air hujan di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>							
h. Pembuatan atau pemeliharaan terasering di desa/kelurahan		<input type="checkbox"/>							
VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM									
601	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi :								
	Kejadian/bencana alam	Kejadian Ada -1 Tidak ada -2	Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1)						
			Tahun 2024		Januari - Mei 2025				
			Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban	Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	a. Tanah longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	b. Banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	c. Banjir bandang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	d. Gempa bumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	e. Tsunami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	f. Gelombang pasang laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	g. Angin puyuh/puting beliung/topan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	h. Letusan gunung api	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	i. Kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
	j. Kekeringan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
k. Abrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	
Kode kolom (5) dan (8): Pilihan boleh lebih dari satu kode									
Korban hilang			-A		Korban terluka/akut		-B		
Korban manguagi			-C		Tidak ada korban hilang/terluka/akut/manguagi		-D		
602	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:								
	a. Sistem peringatan dini bencana alam		Ada -1		Tidak ada -2			<input type="checkbox"/>	
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami		Ada -1		Tidak ada -2		Bukan wilayah potensi tsunami -3		
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)		Ada -1		Tidak ada -2			<input type="checkbox"/>	
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana		Ada -1		Tidak ada -2			<input type="checkbox"/>	
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.		Ada -1		Tidak ada -2			<input type="checkbox"/>	

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

603	Kejadian berikut terjadi di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir:					
	a. Penggundulan hutan, hutan menjadi permukiman, kebun, tambang, dll					
	Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>	
	b. Peningkatan Penggunaan pupuk kimia & pestisida					
	Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>	
c. Peningkatan perilaku kebiasaan membuang sampah dan membuang sampah di tempat ilegal						
Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>		
d. Peningkatan jumlah pabrik dan industri						
Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>		
e. Peningkatan jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 atau lebih						
Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>		
604	Kejadian berikut dirasakan oleh penduduk desa/kelurahan selama 5 tahun terakhir:					
	a. Kelangkaan air karena kemarau panjang					
	Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>
	b. Penduduk desa semakin sulit bertani (srawan hama, kemarau panjang, menengap ikan di laut (cuaca ekstrem), dll)					
	Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>
	c. Penduduk desa kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam (banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dll)					
	Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>
d. Gangguan kesehatan (Pneumonia, Malaria, dan DBD)						
Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>	
e. Kerusakan rumah dan harta benda karena bencana terkait iklim (banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, gelombang pasang)						
Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>	
f. Gagal panen, kerusakan tanaman atau kematian ternak karena bencana terkait iklim						
Ya, ada sebagian besar	-1	Ya, ada sebagian kecil	-2	Tidak dirasakan -3	<input type="checkbox"/>	
VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN						
701	Keberadaan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan					
	Jenis fasilitas pendidikan	Jumlah		Jika tidak ada fasilitas pendidikan (kolom (2) dan kolom (3) terisi 0), untuk mencapai fasilitas pendidikan terdekat	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4	
		Negeri	Swasta			Jarak (km)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	a. TK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. RA/BA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. SD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. MI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. SMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. MTs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g. SMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h. MA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i. SMK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
j. Akademi/Perguruan Tinggi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

702	Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di desa/kelurahan			
	Jenis fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah	Jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan (kolom (2) terisi 0), untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sangat sulit -3 Sulit -4
(1)	(2)	(3)	(4)	
a. Rumah sakit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Klinik utama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
c. Balai kesehatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
d. Puskesmas dengan rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
e. Puskesmas tanpa rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
f. Puskesmas pembantu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
g. Klinik pratama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
h. Praktik mandiri dokter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
i. Praktik mandiri bidan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
j. Poskesdes (pos kesehatan desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
k. Polindes (pondok bersalin desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
l. Apotek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
m. Toko khusus obat/jamu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
703	Jumlah Upaya Kesehatan Berwibernetdaya Masyarakat (UKBM) selama setahun terakhir:			
a.	Jumlah posyandu aktif:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
b.	Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap bulan sekali:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
c.	Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
d.	Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
801	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan :			
a.	Lalu lintas dari/dari desa/kelurahan melalui :			
	Darat -1	Air -2 → R801c	Darat dan air -3	Udara -4 → R801c
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b.	Jika lalu lintas dari/dari desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air (R801a berkode 1 atau 3):			
1.	Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang tertelusur :			
	Aspal/beton -1	Tanah -3		
	Diperkeras (berkil, batu, dll) -2	Lainnya (jalan setapak, bayu/papan, dll) -4		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih :			
	Sepanjang tahun -1			
	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll) -2			
	Selama musim kemarau -3			
	Tidak dapat dilalui sepanjang tahun -4			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c.	Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan :			
1.	Keberadaan angkutan umum: Pilihan boleh lebih dari satu kode. Ada, dengan trayek tetap -A Ada, tanpa trayek tetap -B Tidak ada angkutan umum -X → R802			<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Operasional angkutan umum yang utama :	Setiap hari -1	Tidak setiap hari -2	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	Jam operasi angkutan umum yang utama :	Siang dan malam hari -1	Hanya siang/malam hari -2	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	Ketersediaan angkutan online (memesan angkutan online):	Ada -1	Tidak ada -2	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

(1)	(2)	Jika ada angkutan umum (kolom (2) & silangharian)			jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (satu menit)	Biaya transportasi (Ribu Rupiah)									
		Jenis angkutan umum		Angkutan umum yang utama												
		A	B					C	D	E						
a. Kantor camat	A B C	A	B	C	D	E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Kantor bupati/walikota	A B C	A	B	C	D	E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kode kolom (2): pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - A Keberatan pribadi - B jalan kaki, sepeda, dll. - C		Kode kolom (3): pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - A Kowloon bermotor roda 3 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (jarak, ditempuh, pedati, dll) - E			Kode kolom (4): Ojek sepeda motor - A kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (jarak, ditempuh, pedati, dll) - E											
803	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel:	<input type="text"/>										keluarga				
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone:	<input type="checkbox"/>														
	Sebagian besar warga - 1	Sebagian kecil warga - 2										Tidak ada - 3				
804	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan															
	a. Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS):	<input type="text"/>														
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan:	<input type="text"/>										jenis				
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan:	<input type="checkbox"/>														
	Sinyal sangat kuat - 1	Sinyal kuat - 2										Sinyal lemah - 3	Tidak ada sinyal - 4 → RIBUS			
	d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	<input type="checkbox"/>														
	5G/4G/LTE - 1	3G/WiFi/BYOD - 2										2.5G/E/GPRS - 3	Tidak ada sinyal internet - 4			
805	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos:															
	Beroperasi - 1	Jarang beroperasi - 2										Tidak beroperasi - 3	Tidak ada - 4			
	b. Layanan pos keliling:	Ada - 1										Tidak ada - 2				
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	Beroperasi - 1										Jarang beroperasi - 2	Tidak beroperasi - 3	Tidak ada - 4		
IX. EKONOMI																
901	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling):															
	Ada - 1	Tidak ada - 2										<input type="checkbox"/>				
	b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling):	Ada - 1										Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>			
902	a. Jumlah bank yang beroperasi di desa/kelurahan															
	1. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)											<input type="text"/>				
	2. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll)											<input type="text"/>				
	3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)											<input type="text"/>				
	b. Jika tidak ada bank, perkiraan jarak ke bank terdekat : ... km											<input type="text"/>				
903	Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif:															
	a. Koperasi Unit Desa (KUD)											<input type="text"/>				
	b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopindra)/Usaha mikro											<input type="text"/>				
	c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin)											<input type="text"/>				
	d. Koperasi lainnya											<input type="text"/>				
904	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir:															
	a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)											Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>		
	b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E)											Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>		
	c. Kredit Usaha Kecil (KUK)											Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>		
	d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)											Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>		

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

905	Jumlah fasilitas ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis fasilitas ekonomi	Jumlah	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sufit -3 Sangat sulit -4
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Jika tidak ada fasilitas ekonomi (kolom (2) terisi 0), untuk mencapai fasilitas ekonomi terdekat			
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terpagung, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Jumlah minimarket/swalayan/supermarket (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Penginapan: hotel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
906	a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: Pertanian -1 Industri -2 → R907 Jasa -3 → R907 <input type="checkbox"/>			
	b. Jika sektor pertanian, jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: Tanaman Pangan -1 Peternakan -4 Jasa Pertanian -7 → R907 Tanaman Hortikultura -2 Perikanan -5 Tanaman Perkebunan -3 Kehutanan -6			
	c. Komoditas utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: <input type="text"/>			
907	a. Jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) <input type="text"/>			
	b. Jumlah Sentra Industri: <input type="text"/> lokasi			
	c. Jika terdapat sentra industri, talikan produk pada sentra industri yang mempunyai muatan usaha terbanyak: <input type="text"/> (tuliskan)			
908	a. Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan: Ada -1 Tidak ada -2 → R1001			
	b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: 1. Makanan <input type="text"/> (tuliskan) 2. Non Makanan <input type="text"/> (tuliskan)			
X. KEAMANAN				
1001	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Ada -1 Tidak ada -2 → R1003 <input type="checkbox"/>			
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, jumlah perkelahian massal yang terjadi <input type="text"/>			
	c. Keberadaan korban:			
	1 Meninggal <input type="text"/> Ada -1 Tidak ada -2			
	2 Luka-luka <input type="text"/> Ada -1 Tidak ada -2			
	d. Penyebab perkelahian: Pilihan boleh lebih dari satu kode.			
	Berita -A Amara -C Keramaian (olah raga, liburan, dll.) -E Kekawatiran -B Ideologi/teperceptions -D Ketidaksiapan atau ketidaksiapan/pelayanan -F Lainnya -G			
	A B C D E F G			

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

1002	Upaya penyelesaian perkelahan/masalah dilakukan oleh: Pilihan boleh lebih dari satu kode Aparat keamanan - A Takut masyarakat - C Lainnya - E Aparat pemerintah - B Takut agama - D Tidak ada - F	A B C D E F																												
1003	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir: a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan Ya - 1 Tidak - 2 b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan Ya - 1 Tidak - 2 c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas Ya - 1 Tidak - 2 d. Pelaporan lamu yang mengimp lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan Ya - 1 Tidak - 2 e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
XI. KEUANGAN DAN ASET DESA																														
Blok ini akan terisi jika Blok III R 201, status pemerintahannya adalah Desa atau UPT/SPT atau Nagari																														
1101	a. Keberadaan sistem informasi desa: Ada, diperbaharui - 1 Ada, tidak diperbaharui - 2 Tidak ada - 3 b. Jika ada (R1101a=1 atau 2), kapan terakhir diperbaharui bulan..... dan tahun.... c. Penggunaan sistem keuangan desa: Ada, diperbaharui - 1 Ada, tidak diperbaharui - 2 Tidak ada - 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
1102	Kepemilikan badan usaha dan aset desa: a. Jumlah unit usaha BUMDes. b. Tanah kas desa/layat c. Tambatan perahu d. Pasar (pasar desa, pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian) e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll) f. Hutan milik desa g. Mata air milik desa h. Tempat wisata/Pemandian umum i. Aset desa lainnya (kekayaan asli desa lainnya, hibah/sumbangan/sejenisnya dll)	<input type="checkbox"/> unit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
1103	Jumlah peraturan desa tahun 2024:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> buah																												
XII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN																														
1201	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pemerintah desa/kelurahan</th> <th rowspan="2">Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2</th> <th colspan="3">Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)</th> </tr> <tr> <th>Usur (tahun)</th> <th>Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2</th> <th>Pendidikan tertinggi yang ditamatkan</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Kepala Desa/Lurah</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="5">*) Kode kolom (5): Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9</td> </tr> </tbody> </table>	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)			Usur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*) Kode kolom (5): Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9					
Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2			Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)																										
		Usur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																										
a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
*) Kode kolom (5): Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9																														
1202	Jumlah aparatur pemerintahan desa/kelurahan: a. Sekretaris Desa/Kelurahan b. Pelaksana Teknis c. Pelaksana Kewilayahan d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
1203	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → STOP b. Jika ada (R1203a=1), apakah ada anggota yang perempuan: Ada - 1 Tidak ada - 2 c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2024:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
XIII. CATATAN																														

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

-----*Enlighten The Nation*-----



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAKARTA BARAT**

Jl. Raya Kby. Lama No.5 DKI Jakarta 12210,
Telp. (021) 25673776 E-mail: bps3174@bps.go.id |
Website: jakbarkota.bps.go.id